

BIROKRASI INDONESIA

Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Birokrasi, Birokrasi dan Kelompok, Birokrasi dan Perubahan Sosial, Birokrasi Sebagai Sarana Pembangunan, dan Reformasi Birokrasi.



PT Mafy Media Literasi Indonesia
ANGGOTA IKAPI (041/SBA/2023)
Email: penerbitmafya@gmail.com
Website: penerbitmafya.com



BIROKRASI INDONESIA



BIROKRASI INDONESIA

Dr. Ani Heryani, S.Sos., M.Si.
Dr. Ade Iskandar, SIP., M.Si.
Dr. Drs. Malik, M.Si.

BIROKRASI INDONESIA

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BIROKRASI INDONESIA

Dr. Ani Heryani, S.Sos., M.Si.

Dr. Ade Iskandar, SIP., M.Si.

Dr. Drs. Malik, M.Si.



BIROKRASI INDONESIA

Penulis:

Dr. Ani Heryani, S.Sos., M.Si.

Dr. Ade Iskandar, SIP., M.Si.

Dr. Drs. Malik, M.Si.

Editor:

Andi Asari

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 92 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8427-39-0

Cetakan Pertama:

September 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
PENDAHULUAN	1
BAB I KONSEP DASAR BIROKRASI	3
A. PENTINGNYA MEMAHAMI KONSEP DASAR BIROKRASI.....	3
B. DEFINISI BIROKRASI.....	5
C. PERAN BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA	7
D. FUNGSI BIROKRASI	9
E. ORGANISASI BIROKRASI DI INDONESIA	11
F. MASALAH DAN TANTANGAN BIROKRASI DI INDONESIA	13
BAB II BIROKRASI DAN KELOMPOK STRATEGIS	21
A. BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN.....	21
B. KELOMPOK STRATEGIS DALAM PEMERINTAHAN.....	27
C. HUBUNGAN ANTARA BIROKRASI DAN KELOMPOK STRATEGIS	32
BAB III BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL	35
A. DEFINISI BIROKRASI.....	35
B. KARAKTERISTIK DAN TANTANGAN BIROKRASI	40
C. BIROKRASI DALAM PERUBAHAN SOSIAL	46
D. IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA	48
BAB IV BIROKRASI SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN	51
A. PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN	51
B. BIROKRASI DAN PERKEMBANGAN DALAM DEMOKRASI	57
C. PEMBINAAN KARIER BIROKRASI PEMERINTAHAN.....	61
D. ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN	62

BAB V REFORMASI BIROKRASI	65
A. DEFENISI REFORMASI BIROKRASI.....	65
B. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI	66
C. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI.....	68
D. HAMBATAN DALAM REFORMASI BIROKRASI	76
KESIMPULAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
TENTANG PENULIS.....	87

PRAKATA

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul “Birokrasi Indonesia”. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep Dasar Birokrasi, Birokrasi dan Kelompok, Birokrasi dan Perubahan Sosial, Birokrasi Sebagai Sarana Pembangunan, dan Reformasi Birokrasi.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 15 September 2023

PENDAHULUAN

Birokrasi adalah mesin penggerak pemerintahan yang tak terhindarkan dalam setiap negara. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan keragaman etnis serta geografis yang signifikan, birokrasi memiliki peran sentral dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai entitas yang mengatur, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan pemerintah, birokrasi memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan nasional.

Selama beberapa dekade terakhir, birokrasi Indonesia telah mengalami berbagai transformasi. Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan efisiensi. Namun, perjalanan menuju birokrasi yang lebih baik tidak selalu lancar, dan tantangan-tantangan unik telah muncul.

Dalam buku ini, kita akan menjelajahi perkembangan, tantangan, dan potensi transformasi lebih lanjut dalam birokrasi Indonesia. Kita akan membahas bagaimana birokrasi Indonesia telah berubah sejak masa kemerdekaan, apa masalah utama yang dihadapi, dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai reformasi yang lebih baik. Terlebih lagi, kita akan merinci bagaimana birokrasi Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan nasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang birokrasi Indonesia, kita dapat merenungkan tantangan dan peluang yang terus berkembang di masa depan. Buku ini akan menggali dinamika kompleks dalam birokrasi Indonesia dan bagaimana perubahan di dalamnya dapat membentuk masa depan yang lebih cerah bagi negara ini.

BAB I

KONSEP DASAR BIROKRASI

A. PENTINGNYA MEMAHAMI KONSEP DASAR BIROKRASI

Pentingnya memahami konsep dasar birokrasi sangat terlihat dalam kasus-kasus yang sering muncul dalam konteks birokrasi Indonesia. Salah satu kasus yang mencolok adalah praktik korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat birokrasi tinggi. Korupsi ini sering kali merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Pemahaman konsep dasar birokrasi, seperti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sangat penting dalam mengatasi masalah korupsi ini dan memastikan bahwa birokrasi bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, kasus lainnya adalah lambannya pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Proses administratif yang rumit dan lambat sering kali membuat warga merasa frustrasi ketika berurusan dengan birokrasi. Memahami konsep dasar birokrasi, seperti tata kelola yang baik dan peningkatan efisiensi, dapat membantu dalam memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas dari berbagai lembaga pemerintah.

Dengan memahami konsep dasar birokrasi, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam sistem birokrasi Indonesia dan mencari solusi yang tepat. Hal ini akan membantu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.

Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar birokrasi sangat penting dalam merancang reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Birokrasi adalah sebuah sistem organisasi dan administrasi yang terstruktur, di mana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagi secara hierarkis dalam suatu lembaga atau pemerintahan. Birokrasi sering kali melibatkan aturan, prosedur, dan regulasi yang jelas untuk mengatur bagaimana lembaga atau pemerintahan tersebut beroperasi. Para pejabat atau pegawai dalam birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan layanan publik, dengan garis komando dan hierarki yang jelas. Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan dan masyarakat secara umum. Beberapa alasan mengapa birokrasi penting dalam pemerintahan meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan

Birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka menjalankan program-program pemerintah, mengumpulkan pajak, memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi (Endah and Vestikowati, 2021). Tanpa birokrasi yang efisien, kebijakan-kebijakan ini sulit untuk dilaksanakan dengan baik.

2. Pengawasan dan Pengendalian

Birokrasi membantu dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas pemerintah. Mereka memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

3. Stabilitas dan Kontinuitas

Birokrasi menyediakan stabilitas dalam pemerintahan. Mereka biasanya tidak terpengaruh oleh perubahan politik yang sering terjadi di tingkat politik teratas. Ini memastikan bahwa layanan publik dan kebijakan pemerintah tetap berjalan bahkan ketika terjadi pergantian pemerintah.

4. Penyediaan Layanan Publik

Birokrasi memainkan peran kunci dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, dan banyak lagi. Mereka memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang mereka butuhkan dan memiliki akses yang sama terhadap layanan tersebut.

5. Keamanan dan Pertahanan

Birokrasi juga bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara (Cecep Kurniawan, Setyawan Widyanto, 2018). Mereka menjalankan fungsi-fungsi seperti penegakan hukum, pertahanan nasional, dan perlindungan masyarakat dari ancaman dalam dan luar negeri.

Meskipun birokrasi memiliki peran yang penting dalam pemerintahan, juga penting untuk menjaga agar sistem birokrasi tetap efisien, transparan, dan akuntabel. Ini dapat membantu menghindari birokrasi yang terlalu rumit dan terlalu birokratis sehingga tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. DEFINISI BIKROKRASI

Birokrasi adalah sebuah sistem organisasi yang terstruktur dan formal yang digunakan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan dalam suatu entitas seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi. Sistem birokrasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mencakup hierarki, pembagian tugas dan tanggung jawab, aturan dan prosedur yang jelas, serta pengambilan keputusan yang rasional. Beberapa elemen penting dalam definisi birokrasi termasuk:

1. **Struktur Hierarki:** Birokrasi melibatkan hierarki yang terdiri dari berbagai tingkat atau lapisan. Setiap tingkat memiliki pejabat atau pegawai yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu. Struktur hierarki ini

memungkinkan pengambilan keputusan yang terorganisir dan pengelolaan tugas yang efisien.

2. **Pembagian Tugas:** Dalam birokrasi, tugas dan tanggung jawab dibagi secara jelas (Budiman, Sambiran and Kaawoan, 2017). Setiap anggota birokrasi memiliki peran spesifik yang harus mereka laksanakan. Ini memungkinkan spesialisasi dan pemisahan tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing individu.
3. **Aturan dan Prosedur:** Birokrasi mengandalkan aturan dan prosedur yang terstruktur dan terdokumentasi. Ini mencakup regulasi, peraturan internal, dan pedoman yang harus diikuti oleh anggota birokrasi dalam menjalankan tugas mereka. Aturan ini membantu dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas.
4. **Rasionalitas:** Keputusan yang diambil dalam birokrasi didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan informasi yang relevan dan harus sesuai dengan tujuan organisasi atau pemerintahan.
5. **Impersonalitas:** Birokrasi bersifat impersonal, yang berarti bahwa keputusan dan tindakan yang diambil tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi seperti preferensi, suku, agama, atau hubungan individu. Semua orang harus diperlakukan secara adil dan setara.
6. **Akuntabilitas:** Birokrasi harus akuntabel terhadap pemerintah atau otoritas yang lebih tinggi, serta terhadap masyarakat (Nahrudin, 2014). Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan menghadapi konsekuensi jika melanggar aturan atau kinerja mereka dianggap tidak memadai.

Birokrasi memiliki peran yang penting dalam pemerintahan, bisnis, dan organisasi lainnya dalam menjalankan operasi sehari-hari, mengimplementasikan kebijakan, dan memberikan layanan kepada masyarakat atau pelanggan. Meskipun birokrasi dapat membantu mencapai

efisiensi dan konsistensi, mereka juga dapat menghadapi tantangan seperti birokrasi yang berlebihan, lambannya pengambilan keputusan, dan risiko korupsi. Oleh karena itu, manajemen birokrasi yang efektif menjadi kunci dalam mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

C. PERAN BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Indonesia. Peran birokrasi ini mencakup sejumlah fungsi dan tanggung jawab yang vital dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai peran birokrasi dalam pemerintahan Indonesia:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah: Salah satu peran utama birokrasi adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Birokrasi bertanggung jawab untuk menjalankan program-program pemerintah yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.
2. Pemberian Layanan Publik: Birokrasi menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, perumahan, dan banyak lagi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan ini tersedia, terjangkau, dan berkualitas.
3. Penegakan Hukum dan Keamanan: Birokrasi juga memiliki peran dalam penegakan hukum dan keamanan negara. Ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan departemen terkait lainnya yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat dan mengusut tindak kejahatan.
4. Pengelolaan Sumber Daya: Birokrasi bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya negara seperti anggaran keuangan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Mereka harus memastikan penggunaan sumber daya ini sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Pengawasan dan Pengendalian: Birokrasi berperan dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas pemerintah. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dalam batas anggaran yang disediakan.
6. Perencanaan dan Pembangunan: Birokrasi juga terlibat dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Mereka harus merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek serta mengkoordinasikan pelaksanaannya.
7. Pengelolaan Data dan Informasi: Birokrasi mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan pemerintah. Informasi ini digunakan dalam merancang kebijakan dan mengukur hasil pencapaian.
8. Implementasi Reformasi: Birokrasi juga harus berperan dalam mengimplementasikan reformasi dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Ini bisa mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.

Pentingnya peran birokrasi dalam pemerintahan Indonesia sangat besar, karena mereka adalah tulang punggung dalam menjalankan operasi pemerintahan sehari-hari, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan nasional, dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, tantangan seperti korupsi, birokrasi yang berlebihan, dan kurangnya efisiensi harus diatasi untuk memastikan bahwa birokrasi dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung kemajuan negara.

D. FUNGSI BIROKRASI

Fungsi birokrasi mencakup peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan suatu negara. Birokrasi bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, serta mengawasi dan mengelola berbagai aspek sumber daya dan infrastruktur. Dengan fungsi-fungsi ini, birokrasi menjadi tulang punggung dalam menjalankan operasi pemerintahan dan mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan negara.

1. Penyelenggaraan Pemerintah

a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

Birokrasi berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Mereka membantu merumuskan rencana kebijakan, menyusun anggaran, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengawasan dan Pengendalian

Birokrasi memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran. Mereka juga memantau kinerja instansi pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap aturan.

c. Penegakan Hukum

Birokrasi yang terkait dengan penegakan hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, bertugas menjaga ketertiban masyarakat, menyelidiki tindak kejahatan, dan memastikan keadilan di dalam sistem peradilan.

2. Pelayanan Publik

a. Pemberian Layanan Kesehatan:

Birokrasi di sektor kesehatan bertugas menyelenggarakan sistem kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan program-program kesehatan masyarakat untuk memberikan perawatan kesehatan kepada warga.

b. Pendidikan

Birokrasi pendidikan mengawasi dan mengelola sekolah, universitas, dan program pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas tersedia bagi masyarakat.

c. Pelayanan Sosial

Birokrasi menyediakan layanan sosial seperti bantuan sosial, perumahan, dan perlindungan anak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

d. Perizinan dan Regulasi

Birokrasi yang terkait dengan perizinan mengeluarkan izin usaha, izin bangunan, dan regulasi lainnya yang mengatur berbagai sektor ekonomi.

3. Pembangunan

a. Perencanaan Pembangunan

Birokrasi terlibat dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Mereka merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

b. Pengelolaan Sumber Daya

Birokrasi mengelola sumber daya negara seperti anggaran, infrastruktur, dan sumber daya alam. Mereka memastikan penggunaan sumber daya ini sesuai dengan kebijakan pembangunan.

c. Pelaksanaan Proyek Infrastruktur

Birokrasi mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan proyek-proyek penting lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan masyarakat.

d. Pengembangan Ekonomi

Birokrasi di sektor ekonomi bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi, mendukung investasi, dan mengawasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.

Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa birokrasi memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan mendukung pembangunan nasional. Namun, agar fungsi-fungsi ini dapat dijalankan dengan baik, birokrasi perlu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi disertai aspek tugas serta responsif kebutuhan masyarakat.

E. ORGANISASI BIROKRASI DI INDONESIA

Organisasi birokrasi di Indonesia mencakup beberapa tingkatan yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, pelayanan publik, dan lain-lain. Berikut penjelasan mengenai organisasi birokrasi yang umum di Indonesia:

1. Organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Organisasi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Dasar 1945 dimana pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi ini dituangkan dalam Undang-undang. Organisasi tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Komisi

Pemilihan Umum, Bank Indonesia, TNI dan Kepolisian serta Dewan Pertimbangan Presiden.

2. Organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang antara lain :

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- d. Ombudsman, merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- f. Komisi Nasional Anak (Komnas Anak), yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Komisi ASN, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain.

F. MASALAH DAN TANTANGAN BIROKRASI DI INDONESIA

Birokrasi di Indonesia menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tantangan tersebut mencakup isu korupsi yang persisten, birokrasi yang terkadang lambat dan rumit, serta perluasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Membahas dan mengatasi tantangan-tantangan ini adalah kunci untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

1. Korupsi

Korupsi adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh birokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi terjadi ketika pejabat atau pegawai birokrasi menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk tujuan pribadi, seperti memeras uang atau menerima suap (Arifin and Irsan, 2019).

Dalam konteks birokrasi, korupsi sering kali merujuk pada tindakan ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau anggota birokrasi dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi dalam konteks birokrasi menjadi masalah yang besar.

a. Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi dalam birokrasi sering terjadi ketika pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan dan wewenang mereka dengan cara yang tidak sah. Ini bisa termasuk menerima suap untuk memberikan

izin atau kontrak, memanipulasi proses pengadaan, atau menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi.

b. Kerugian bagi Negara dan Masyarakat

Korupsi dalam birokrasi merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau layanan publik sering kali disalahgunakan, yang dapat menghambat pembangunan dan meningkatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

c. Ketidakpercayaan Terhadap Birokrasi

Korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pemerintah. Ini dapat merusak reputasi institusi pemerintah dan mengurangi legitimasi pemerintah di mata publik.

d. Upaya Penanggulangan

Penanggulangan korupsi dalam birokrasi melibatkan berbagai tindakan, seperti penguatan sistem pengawasan dan audit, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, dan promosi transparansi dan akuntabilitas. Pemberian pelatihan etika kepada pejabat pemerintah juga dapat membantu mencegah korupsi.

e. Dampak pada Pembangunan: Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dana yang disalahgunakan dalam kasus korupsi bisa digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Birokrasi yang Lambat

Birokrasi yang lambat atau terlalu rumit dapat menghambat efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses birokrasi yang berbelit-belit, lama, dan penuh dengan prosedur yang memakan waktu bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan program-program pemerintah (Lestari, 2019).

Birokrasi yang lambat merujuk pada kondisi di mana lembaga-lembaga pemerintah atau administrasi publik beroperasi dengan tingkat efisiensi yang rendah, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik menjadi terhambat dan memakan waktu yang lama. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya birokrasi yang lambat, dan berikut adalah beberapa penjelasan terkait fenomena ini:

a. Prosedur yang Rumit

Birokrasi yang lambat seringkali disebabkan oleh prosedur administratif yang rumit dan berbelit-belit. Proses pengambilan keputusan atau perizinan yang melibatkan banyak tahap atau persyaratan yang sangat ketat dapat memperlambat kelancaran proses.

b. Ketidakcukupan Sumber Daya: Kadang-kadang, lembaga pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup baik dalam hal personil maupun teknologi. Hal ini dapat menghambat kinerja mereka dalam menangani tugas-tugas administratif dengan efisien.

c. Ketidakmampuan dalam Mengadopsi Teknologi

Birokrasi yang tidak mampu mengadopsi teknologi informasi modern sering kali akan mengalami keterlambatan dalam pengolahan data dan pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi yang lambat.

d. Kebijakan yang Tidak Efektif

Terkadang, kebijakan yang tidak baik dirancang atau tidak diterapkan dengan baik dapat menyebabkan birokrasi yang lambat. Kebijakan yang ambigu atau kontradiktif bisa membuat pejabat pemerintah bingung dalam mengambil tindakan yang tepat.

e. Ketidakmampuan dalam Merespons Perubahan

Birokrasi yang kaku dan tidak mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, atau teknologi dengan cepat akan cenderung lambat dalam berbagai aspek kinerjanya.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi mencakup kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai pemerintah. Kualitas SDM yang rendah dapat menghambat kemampuan birokrasi dalam menjalankan tugasnya dengan efektif.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah faktor kunci dalam mengatasi permasalahan birokrasi dalam suatu negara atau organisasi pemerintahan. Dalam konteks birokrasi, kualitas SDM mencakup kemampuan dan karakteristik para birokrat yang memegang peran kunci dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik. Beberapa aspek penting kualitas SDM dalam mengatasi permasalahan birokrasi diantaranya sebagai berikut.

a. Pendidikan dan Keterampilan

Birokrasi yang efisien dan responsif memerlukan birokrat yang memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan yang relevan dengan tugas mereka. Pendidikan yang baik, baik dalam bentuk formal maupun pelatihan lanjutan, membantu birokrat untuk memahami tugas mereka

- dengan lebih baik dan mengejar praktik terbaik dalam pelaksanaan tugas administratif.
- b. Etika dan Integritas

Kualitas SDM dalam birokrasi juga mencakup karakter dan etika kerja. Birokrat yang memiliki integritas yang tinggi akan cenderung mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan bahwa keputusan mereka diambil berdasarkan pertimbangan yang adil dan transparan.
 - c. Kemampuan Manajemen dan Kepemimpinan

Birokrasi membutuhkan birokrat yang mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Kemampuan manajemen yang kuat dan kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk merancang kebijakan, mengambil keputusan, dan memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - d. Keterbukaan Terhadap Inovasi dan Perubahan

Birokrasi yang berkualitas juga harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan dalam sistem administrasi. SDM yang fleksibel dan bersedia untuk mengadaptasi praktik-praktik baru dan teknologi informasi canggih akan membantu birokrasi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - e. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas SDM diukur juga dari kemampuan mereka untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Birokrat yang ramah, kompeten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah.

f. Pengawasan dan Akuntabilitas

Bagian dari kualitas SDM dalam birokrasi adalah kemampuan untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugas administratif. Ini mencakup kemampuan untuk memeriksa kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Meningkatkan kualitas SDM dalam birokrasi adalah langkah penting dalam mengatasi permasalahan birokrasi seperti korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya transparansi. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan etika kerja serta integritas adalah komponen utama dalam membangun birokrasi yang efisien dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini melibatkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, seperti:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan, serta memastikan akuntabilitas dalam tindakan pegawai pemerintah.

b. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Investasi dalam pelatihan dan pendidikan pegawai pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dalam birokrasi.

c. Sistem Pengawasan yang Kuat

Membangun sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah serta mengatasi korupsi, serta memastikan ketaatan terhadap prosedur dan regulasi.

d. Sederhana dan Efisien

Vereinfachen und beschleunigen Sie die bürokratischen Verfahren, um die Effizienz zu steigern und den Zugang der Bürger zu öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern.

e. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi.

Perbaikan dalam ketiga area ini dapat membantu mengatasi masalah dan tantangan dalam birokrasi, yang pada gilirannya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB II

BIROKRASI DAN KELOMPOK STRATEGIS

A. BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN

Birokrasi adalah sistem administratif yang kompleks dan penting yang berperan sentral dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Pemandangan umum di hampir setiap negara di dunia, birokrasi memiliki tugas utama dalam mengelola kebijakan pemerintah, menyediakan layanan publik, menjaga stabilitas, dan memastikan bahwa berbagai sektor pemerintahan berjalan efisien. Entitas yang terdiri dari banyaknya individu yang bekerja di berbagai tingkatan hierarki dan departemen, dengan masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab. Sebagai sebuah sistem, birokrasi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintahan berfungsi sesuai dengan tujuan untuk melayani kepentingan warga negara, meskipun sering kali berinteraksi dengan tantangan, kritik, dan perubahan yang kompleks dalam konteks politik serta sosial yang selalu berubah. Untuk memahami dinamika birokrasi dalam pemerintahan, maka perlu menjelajahi perannya dalam pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan, penyediaan layanan publik, dan menjaga stabilitas dalam sistem politik dan administratif (Green, 2020). Peran utama birokrasi dalam pemerintahan, antara lain:

1. Pelaksanaan Kebijakan

Salah satu peran utama birokrasi adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin politik atau legislator. Bertanggung jawab dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret dan menyediakan layanan publik.

2. Stabilitas dan Kontinuitas

Birokrasi memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan, terlepas dari perubahan pemimpin politik yang terjadi akibat pemilihan umum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan terus berjalan.

3. Penyediaan Layanan Publik

Birokrasi juga berperan dalam menyediakan berbagai layanan publik kepada warga negara, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Bertanggung jawab untuk menjaga agar layanan-layanan ini efektif dan efisien.

4. Pengambilan Keputusan

Birokrasi umumnya tidak memiliki peran dalam pembuatan kebijakan, tetapi sering kali terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan analisis, rekomendasi, dan informasi teknis kepada para pembuat kebijakan.

5. Implementasi

Birokrasi juga berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program-program pemerintah untuk memastikan berjalan sesuai rencana dan berkontribusi pada tujuan-tujuan pemerintah.

1. Aspek Birokrasi dalam Pemerintahan

Terdapat beberapa konsep dan aspek yang relevan dalam studi tentang birokrasi dalam pemerintahan mencakup pemahaman tentang bagaimana birokrasi berfungsi, mempengaruhi kebijakan publik, dan peran serta tantangan yang dihadapi. Aspek penting dalam studi tentang birokrasi dalam pemerintahan, antara lain: (Stillman and Stillman 2020).

a. Hierarki Birokrasi

Birokrasi dalam pemerintahan umumnya memiliki struktur hierarkis dengan tingkat-tingkat yang berbeda, mulai dari pejabat puncak hingga pegawai operasional. Pemahaman tentang hierarki penting untuk menilai keputusan ketika diciptakan dan pelaksanaan kebijakan dijalankan.

b. Rasionalitas dan Efisiensi

Birokrasi sering dilihat sebagai sistem yang berorientasi pada rasionalitas dan efisiensi. Birokrasi bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dengan cara yang paling efisien, sering kali dengan mengacu pada prosedur dan peraturan yang ketat.

c. Spesialisasi

Birokrasi melibatkan spesialisasi dalam berbagai bidang, seperti keuangan, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Birokrasi untuk mengelola sektor-sektor yang berbeda dengan tingkat keahlian yang tinggi.

d. Kepatuhan Terhadap Aturan

Birokrasi dikenal karena patuh terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

e. Diskresi Birokratik

Meskipun birokrasi memiliki peraturan dan prosedur, birokrat juga memiliki sejumlah diskresi atau kebebasan untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu, menciptakan ruang untuk penilaian pribadi dalam pelaksanaan kebijakan.

f. Politik dan Birokrasi

Hubungan antara politikus dan birokrasi ialah aspek penting dalam studi tentang birokrasi. Politikus sering mempengaruhi pengangkatan pejabat birokrasi puncak dan memengaruhi arah kebijakan.

g. Akuntabilitas

Salah satu tantangan dalam birokrasi ialah menjaga akuntabilitas. Birokrasi harus bertanggung jawab kepada para pemimpin politik dan dalam banyak kasus kepada masyarakat.

h. Peran dalam Pengambilan Keputusan

Birokrasi sering terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis kebijakan, rekomendasi, dan informasi teknis kepada pembuat kebijakan.

i. Reformasi Birokrasi

Studi tentang birokrasi mencakup upaya-upaya reformasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan transparansi.

j. Isu Etika

Pertimbangan etika juga penting dalam studi tentang birokrasi, karena pejabat birokrasi sering kali menghadapi situasi dimana mereka harus membuat keputusan yang melibatkan etika dan moral.

2. Proses Keputusan Birokrasi dalam Pemerintahan

Proses pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan ialah suatu rangkaian tahapan yang cermat dan terstruktur, menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah (Straussman 2014). Tahapan pertama yaitu penentuan agenda, di mana isu-isu memerlukan perhatian pemerintah diidentifikasi dan ditempatkan dalam konteks prioritas politik, kebutuhan masyarakat. Penentuan agenda dipengaruhi berbagai faktor, termasuk tekanan dari masyarakat, perubahan dalam lingkungan sosial atau ekonomi, atau prioritas politik yang ditetapkan oleh para pemimpin politik.

Setelah agenda ditetapkan, tahap berikutnya ialah penelitian dan analisis mendalam tentang isu-isu tersebut. Birokrasi akan mengumpulkan data, melakukan penilaian risiko, dan menganalisis dampak potensial dari berbagai opsi kebijakan (Henry 2019). Proses ini seringkali melibatkan ahli atau peneliti yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu untuk memberikan wawasan yang mendalam. Kemudian setelah penelitian dan analisis selesai, birokrasi akan merumuskan opsi kebijakan melibatkan pembuatan berbagai solusi yang dapat diambil untuk mengatasi isu-isu yang telah diidentifikasi. Setiap opsi kebijakan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi keuntungan dan kerugian, serta implikasi jangka panjang. Proses perumusan kebijakan berfokus pada mencari solusi yang paling sesuai dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Setelah opsi kebijakan dirumuskan, birokrasi akan menyajikan rekomendasi kepada para pemimpin politik yang berwenang mengambil keputusan akhir mengenai kebijakan yang diadopsi melibatkan komunikasi efektif antara birokrasi dan pembuat keputusan politik, dengan penekanan pada pengungkapan informasi yang akurat dan rekomendasi yang solid.

3. Implementasi Kebijakan Birokrasi dalam Pemerintahan

Hill & Hupe, (2020), Implementasi kebijakan birokrasi dalam pemerintahan ialah tahap kritis dalam proses kebijakan publik di mana rencana-rencana yang telah dirumuskan mulai dijalankan di lapangan. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan konkret yang dilakukan oleh birokrasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin politik atau legislator. Salah satu aspek penting dari implementasi adalah mengalokasikan sumber daya, termasuk personel dan anggaran, serta mengkoordinasikan berbagai lembaga atau departemen yang terlibat dalam pelaksanaan.

Selain itu, birokrasi juga harus memastikan bahwa informasi dan panduan terkini tersedia kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Di samping itu, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi esensial untuk memastikan bahwa program-program dan kebijakan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan birokrasi seringkali menghadapi tantangan, seperti birokrasi yang kompleks, perubahan kondisi di lapangan, dan perubahan prioritas politik (Bardach 2017). Oleh karena itu, kemampuan birokrasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dan menjalankan kebijakan dengan efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat.

B. KELOMPOK STRATEGIS DALAM PEMERINTAHAN

Kelompok strategis dalam pemerintahan merujuk pada entitas atau badan-badan yang memiliki peran khusus dalam membantu merumuskan, mengimplementasikan, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (Meier and O'Toole 2006). Kelompok-kelompok ini berperan sebagai penasihat, pemangku kepentingan, atau ahli dalam berbagai bidang kebijakan, seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau keamanan nasional. Mereka diundang atau ditunjuk untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan karena pengetahuan atau keahlian yang dianggap kritis dalam konteks kebijakan tertentu.

Salah satu karakteristik utama dari kelompok strategis ialah fokus pada penyediaan masukan berdasarkan bukti dan data yang kuat, yang digunakan untuk membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis informasi. Kelompok strategis ini juga berperan dalam membantu pemerintah mengidentifikasi isu-isu kunci, mengevaluasi potensi dampak kebijakan, dan menguraikan opsi kebijakan. Dengan kata lain, berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kelompok strategis seringkali bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sipil atau sektor swasta. Dapat membantu memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif, menjadikan berbagai pihak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan.

Meskipun kelompok strategis dapat membawa manfaat yang signifikan dalam proses kebijakan, juga dapat menjadi subjek perdebatan dan kritik. Terdapat kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok ini memiliki kepentingan khusus atau agenda tersembunyi yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi, etika, dan tata kelola yang baik menjadi sangat penting dalam mengelola

hubungan antara pemerintah dan kelompok strategis. Secara keseluruhan, kelompok strategis dalam pemerintahan kebijakan modern, membantu pemerintah membantu kebijakan yang lebih informasional, inklusif, dan berorientasi pada solusi yang efektif.

1. Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan dalam konteks kelompok strategis dalam pemerintahan ialah individu atau pejabat yang memiliki peran utama dalam merancang, membentuk, dan mengarahkan kebijakan publik. Para pengambil keputusan yang memiliki wewenang untuk menentukan arah dan tujuan kebijakan pemerintah. Pembuat kebijakan ini bisa mencakup pejabat tinggi seperti presiden, menteri, gubernur, atau pejabat tinggi lainnya yang memiliki tanggung jawab eksekutif dalam pemerintahan. Pembuat kebijakan adalah aktor kunci dalam proses kebijakan publik. Mengambil keputusan berdasarkan informasi, analisis, dan masukan dari berbagai sumber, termasuk kelompok strategis, ahli, pemangku kepentingan, serta analisis kebijakan yang mendalam. Keputusan yang mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintahan secara keseluruhan (Sabatier 2007).

Selain itu, pembuat kebijakan sering kali bertanggung jawab atas komunikasi dan legitimasi kebijakan kepada masyarakat. Mereka harus dapat menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil kepada publik, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dipegang oleh pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa pembuat kebijakan bekerja dalam lingkungan yang kompleks dan sering kali harus mengatasi berbagai tekanan dan kendala dalam pengambilan keputusan. Meier & O'Toole, (2006), dalam konteks kelompok strategis, mereka juga dapat berinteraksi dengan

berbagai pihak untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan merumuskan kebijakan yang lebih baik. Kesadaran mereka akan implikasi dan dampak kebijakan yang diambil sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengambil Keputusan Strategis

Pengambil keputusan strategis adalah individu atau pejabat yang memegang peran kunci dalam menentukan arah strategis pemerintahan, mengidentifikasi prioritas, dan merumuskan tujuan jangka panjang. Perannya sangat penting dalam membentuk visi dan misi pemerintahan serta mengarahkan kebijakan dan program yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Aspek penting yang terkait dengan pengambil keputusan strategis dalam pemerintahan, diantaranya: (Hill & Hupe, 2020).

a. Penentuan Visi dan Misi

Pengambil keputusan strategis berperan dalam merumuskan visi jangka panjang pemerintahan, yaitu gambaran tentang tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai oleh pemerintah selama beberapa tahun berikutnya. Membantu dalam menentukan misi, pernyataan tentang bagaimana pemerintah akan mencapai visi tersebut melalui kebijakan dan programnya.

b. Identifikasi Prioritas

Pengambil keputusan strategis harus mengidentifikasi prioritas pemerintahan, yaitu isu-isu atau tantangan yang paling mendesak dan penting untuk diatasi. Hal ini termasuk analisis berbagai faktor, termasuk masalah sosial, ekonomi, keamanan, dan lingkungan untuk menentukan alokasi sumber daya dan upaya pemerintah yang sebaiknya difokuskan.

c. Perumusan Kebijakan

Terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah yang mendukung visi, misi, dan prioritas yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengembangan ide-ide kebijakan, analisis dampak, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

d. Pengelolaan Rencana Strategis

Pengambil keputusan strategis juga bertanggung jawab atas pengelolaan rencana strategis pemerintahan. Memastikan bahwa rencana tersebut terimplementasi sesuai dengan jadwal dan mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

e. Evaluasi Kinerja

Pengambil keputusan strategis secara teratur mengevaluasi kinerja pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan jangka panjang tercapai. Jika terdapat ketidaksesuaian, mungkin perlu untuk menyesuaikan rencana strategis atau kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Interaksi dengan Birokrasi

Interaksi antara kelompok strategis dan birokrasi adalah bagian kunci dari proses perumusan dan implementasi kebijakan dalam pemerintahan. Kelompok strategis bertindak sebagai penghubung antara visi, misi, dan tujuan pemerintahan dengan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapainya (Sabatier 2007). Berikut aspek penting dalam interaksi ini, meliputi:

a. Pengembangan Kebijakan

Berkontribusi mengembangkan kebijakan berdasarkan visi dan tujuan yang ditetapkan. Dapat memberikan masukan dan saran berdasarkan pengetahuan khusus pada berbagai bidang. Selain itu,

- membantu merumuskan opsi kebijakan yang memungkinkan pemerintah mencapai tujuannya.
- b. Komunikasi dengan Birokrasi

Kelompok strategis berkomunikasi secara aktif dengan berbagai departemen pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan termasuk berbagi informasi, panduan, dan tujuan kebijakan dengan birokrasi yang akan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.
 - c. Koordinasi dan Kolaborasi

Untuk memastikan implementasi yang efektif, kelompok strategis perlu bekerja sama dengan birokrasi dalam koordinasi dan kolaborasi yang erat melibatkan pembagian tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan perencanaan yang terkoordinasi.
 - d. Pemantauan dan Evaluasi

Kelompok strategis juga terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh birokrasi sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan, dan jika terdapat kendala atau perubahan yang diperlukan, maka dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan.
 - e. Respons terhadap Perubahan

Kebijakan dan prioritas pemerintahan dapat berubah seiring dengan perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, atau politik. Kelompok strategis perlu berinteraksi dengan birokrasi untuk merespons perubahan tersebut dan memastikan bahwa kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif.

C. HUBUNGAN ANTARA BIROKRASI DAN KELOMPOK STRATEGIS

Berikut adalah tabel yang merinci hubungan antara Kelompok Strategis dan Birokrasi dalam pemerintahan:

Tabel 1. Hubungan antara Kelompok Strategis dan Birokrasi dalam Pemerintahan

Aspek	Kelompok Strategis	Birokrasi
Peran	Memberikan masukan dan saran untuk merumuskan kebijakan dan tujuan pemerintahan.	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kebijakan dan menjalankan tindakan konkret.
Komunikasi	Berkomunikasi dengan departemen pemerintahan untuk memastikan implementasi yang efektif.	Melakukan komunikasi internal untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan.
Pengembangan Kebijakan	Membantu dalam pengembangan ide-ide kebijakan berdasarkan pengetahuan khusus.	Terlibat dalam perumusan kebijakan berdasarkan panduan dan arahan dari pemerintah.
Koordinasi dan Kolaborasi	Bekerja sama dalam koordinasi dan kolaborasi yang erat untuk implementasi yang sukses.	Berkolaborasi dengan departemen dan entitas lain dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.
Pemantauan dan Evaluasi	Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan konsistensi dengan tujuan.	Bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi kinerja departemen.
Respons terhadap Perubahan	Merespons perubahan visi atau prioritas pemerintahan dan memberikan rekomendasi yang sesuai.	Menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan perubahan dalam arah strategis atau prioritas.

Tabel di atas menggambarkan peran dan interaksi yang berbeda antara kelompok strategis dan birokrasi dalam pemerintahan. Kelompok strategis berfokus pada perumusan kebijakan dan memberikan panduan, sementara birokrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan implementasi kebijakan yang telah dirumuskan. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif.

1. Kendala dan Tantangan Hubungan antara Birokrasi dan Kelompok Strategis

Hubungan antara kelompok strategis dan birokrasi dalam pemerintahan sering kali dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama (Moynihan and Pandey 2010). Berikut ialah beberapa kendala dan tantangan utama yang sering dihadapi, diantaranya:

a. Perbedaan Prioritas dan Agenda

Kelompok strategis memiliki prioritas dan agenda yang berbeda dengan birokrasi. Konflik kepentingan ini dapat menghambat kerja sama dan mengganggu implementasi kebijakan,

b. Kekurangan Sumber Daya

Birokrasi sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk personel dan anggaran. Dapat menghambat kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan oleh kelompok strategis.

c. Kurangnya Koordinasi

Tidak adanya koordinasi yang efektif antara kelompok strategis dan birokrasi dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan, pemborosan sumber daya, atau bahkan konflik.

- d. **Tingkat Birokrasi yang Tinggi**

Birokrasi yang sangat kompleks dan berlapis-lapis dapat membuat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi lambat dan rumit.
- e. **Biaya Politik**

Keputusan yang diambil oleh kelompok strategis dan diimplementasikan oleh birokrasi sering kali memiliki implikasi politik. Dapat membuat pihak-pihak yang terlibat cemas akan dampak politik dari tindakannya.
- f. **Ketidakpastian dan Perubahan Lingkungan**

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berubah dengan cepat dapat mengganggu perumusan dan implementasi kebijakan. Hal ini dapat memerlukan penyesuaian yang cepat dan responsif.
- g. **Kurangnya Transparansi**

Ketidajelasan dalam komunikasi antara kelompok strategis dan birokrasi dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses kebijakan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.
- h. **Resistensi Internal**

Birokrasi mungkin menghadapi resistensi internal dari pegawai atau unit-unit yang enggan mengubah praktik atau kebijakan yang sudah ada.

BAB III

BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. DEFINISI BIROKRASI

Birokrasi adalah sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki struktur hierarkis, aturan dan prosedur resmi, garis hierarki yang jelas, perekrutan berdasarkan prestasi, dan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur resmi. Ini adalah jenis administrasi publik yang membantu mencapai tujuan publik dan memasukkan keadilan, rasionalitas, disiplin, dan kesetaraan ke dalam administrasi (Kali, 2020). Karena birokrasi cenderung memaksa orang untuk tunduk padanya dan melakukan pekerjaan mereka tanpa memahami dan/atau memiliki kontrol atas tujuan yang telah ditetapkan, birokrasi dapat bersifat memaksa dan menghambat. Namun, birokrasi juga dapat memberdayakan jika mengandung pemberdayaan struktural (Rodríguez-Fernández et al., 2022).

Birokrasi adalah sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki struktur hierarkis, aturan dan prosedur resmi, perekrutan berdasarkan kemampuan, dan kepatuhan pada aturan dan prosedur resmi. Birokrasi, menurut Weber, adalah sistem organisasi yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan rasionalitas dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif melalui penerapan aturan, struktur hierarkis, dan divisi kerja. Seorang sosiolog Prancis, Michel Crozier, menggambarkan birokrasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai kepentingan dan kekuasaan, yang menghasilkan konflik

internal dan berbagai tindakan yang tidak selalu sesuai dengan aturan.

Sistem atau organisasi yang diorganisasikan secara hierarkis disebut struktur birokrasi. Ini biasanya ditunjukkan dengan sistem aturan dan prosedur yang ketat dan kompleks. Perusahaan besar dan lembaga pemerintah sering dikaitkan dengan ini. Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi organisasi dan individu. Ada yang percaya bahwa itu dapat menyebabkan birokrasi, inefisiensi, dan resistensi terhadap perubahan, sementara yang lain berpendapat bahwa itu membuat organisasi lebih stabil, dapat diprediksi, dan lebih bertanggung jawab (Abbasi, 2017). Berikut adalah beberapa fungsi birokrasi yang umum (Hidayati & Meiwanda, 2022):

1. Implementasi dan perumusan kebijakan
2. Legislasi yang didelegasikan
3. Ajudikasi administratif
4. Penyediaan layanan publik
5. Pengaturan sumber daya
6. Memastikan partisipasi warga negara
7. Memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan
8. Pembentukan nilai-nilai birokrasi

Untuk organisasi birokrasi beroperasi dengan baik, fungsi-fungsi ini sangat penting. Namun, birokrasi juga dapat menghadapi masalah seperti politisasi, ketidakefisienan, korupsi, dan ketidakefektifan, yang dapat mengganggu operasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi melakukan beberapa tugas khusus berikut (Moutsios, 2022):

1. Untuk memastikan pengalihan sumber daya ke dalam kegiatan yang menghasilkan pertumbuhan, rencanakan atau ambil tindakan.
2. Menyediakan kombinasi baru dari birokrasi dan manajemen publik untuk memikul tanggung jawab administrasi publik

3. Menyediakan minimum persyaratan hukum dan pelayanan publik untuk pertumbuhan ekonomi
4. Memastikan prioritas yang tepat untuk pertimbangan ekonomi jangka panjang
5. menyediakan pemerintahan yang dioperasikan sepenuhnya oleh birokrat
6. membuat pemerintah bekerja untuk kepentingan birokrat yang egois
7. mengubah akademisi menjadi pekerja wirausaha yang kompetitif, terikat kontrak dan diawasi secara menyeluruh untuk kinerja dan produktivitas melalui perangkat lunak khusus
8. Mengatur hubungan antara masyarakat dan negara
9. Inisiatif e-governance untuk memelihara sistem administrasi pertanahan

Fungsi khusus ini menunjukkan bahwa birokrasi dapat melakukan banyak hal dalam berbagai hal, seperti pembangunan ekonomi, administrasi publik, kontrol pemerintah, manajemen akademis, dan administrasi pertanahan.

Berikut adalah beberapa peran umum birokrasi dalam menjalankan pemerintahan dan administrasi (Sulistiyani et al., 2021):

1. Implementasi kebijakan dan program: Pejabat terpilih membuat kebijakan dan program, dan birokrat bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan secara efektif dan efisien.
2. Penyediaan layanan publik: Birokrat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kesejahteraan sosial disediakan kepada masyarakat secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif.

3. Pengaturan Sumber Daya: Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan sumber daya seperti tanah, air, dan udara yang berkelanjutan dan dilindungi dari eksploitasi.
4. Memastikan partisipasi warga negara: Tugas birokrat adalah menjamin bahwa warga negara memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi melalui audiensi publik, pertemuan di balai kota, dan cara-cara lainnya.
5. Umpan balik kepada Pembuat Kebijakan: Tugas birokrat adalah memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan tentang seberapa efektif program dan kebijakan. Mereka memberikan data dan analisis yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki program dan kebijakan tersebut.
6. Membentuk Nilai-nilai Birokrasi: Tugas birokrat adalah memastikan bahwa birokrasi berfungsi dengan etis dan profesional serta bertanggung jawab kepada publik.

Singkatnya, birokrasi memainkan peran penting dalam menjamin bahwa sistem pemerintahan dan administrasi beroperasi dengan baik dan lancar. Mengimplementasikan kebijakan dan program, menyediakan layanan publik, mengatur sumber daya, menjamin partisipasi warga negara, memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan, dan membentuk nilai-nilai birokrasi adalah semua tanggung jawab birokrasi. Pemerintahan dan administrasi dilakukan secara khusus oleh birokrasi. Berikut adalah beberapa hal yang sangat penting (Asatryan et al., 2015):

1. Kualitas kebijakan publik yang disampaikan dipengaruhi oleh organisasi birokrasi.
2. Salah satu bagian penting dari pemerintahan yang efektif adalah sistem layanan sipil. Pemerintahan yang memiliki otonomi pegawai negeri sipil lebih efisien dan tidak terlalu korup dibandingkan dengan pemerintahan di

mana pegawai negeri sipil bergantung pada koneksi politik.

3. E-government, yang memungkinkan warga negara berinteraksi langsung dengan negara mereka melalui internet, secara fundamental mengubah bagaimana hubungan antara negara dan warganya. Ini menciptakan paradigma baru administrasi publik yang bertentangan dengan paradigma birokrasi konvensional.
4. Solusi digital telah menjadi bagian penting dari pengembangan administrasi publik, dan manajemen elektronik adalah alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan.

Fungsi birokrasi pemerintah Indonesia dalam konteks perubahan sosial, Berikut adalah beberapa poin penting yang harus diperhatikan (Ho, 2022):

1. Karena menjadi negara pertama di dunia yang secara tegas mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong penerapan CSR.
2. Terutama dalam konteks transformasi digital, birokrasi Indonesia menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan publik yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
3. Kebijakan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi tidak menghasilkan keuntungan politik yang signifikan bagi pemerintah dikenal sebagai "kebijakan benevolent" dan dapat ditelusuri kembali ke birokrasi pemerintah.
4. Kehadiran perempuan dalam birokrasi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah masih terbatas, karena laki-laki masih menduduki mayoritas jabatan eselon.
5. Dengan bekerja sama dengan kementerian lain, perusahaan swasta dalam negeri, BUMN, dan negara lain, Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan

telah melakukan tugas strategis dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk di bidang kesehatan, keamanan, dan sosial-ekonomi.

Secara keseluruhan, dalam konteks perubahan sosial, birokrasi pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal, seperti pelayanan publik, kebijakan sosial, peran gender, manajemen krisis, dan CSR. Birokrasi pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial, tetapi juga menghadapi tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi.

B. KARAKTERISTIK DAN TANTANGAN BIROKRASI

Birokrasi adalah organisasi formal dan terstruktur yang berfokus pada aturan dan prosedur, spesialisasi tugas, dan struktur hierarkis untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efisien dan konsisten. Namun, birokrasi juga bisa tahan terhadap perubahan dan ditandai dengan kelembaman birokrasi. Berikut adalah beberapa ciri utama birokrasi (Zhou, 2021):

1. Impersonalisasi: Fokus birokrasi adalah aturan dan prosedur daripada hubungan pribadi.
2. Pelembagaan: Birokrasi adalah organisasi formal yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Aturan Formal: Aturan dan prosedur formal menjaga birokrasi konsisten dan adil.
4. Efisiensi: Birokrasi dimaksudkan untuk menjadi sistem manajemen dan organisasi yang efisien.
5. Spesialisasi: Birokrasi ditandai dengan pembagian pekerjaan dan spesialisasi tugas.
6. Hierarki: Birokrasi memiliki struktur hirarkis yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab apa.
7. Standarisasi: Standarisasi prosedur dan proses adalah ciri khas birokrasi.
8. Resistensi terhadap Perubahan: Karena birokrasi berpusat pada aturan dan protokol, mereka dapat menahan perubahan.

Organisasi birokrasi memiliki struktur otoritas dan tanggung jawab yang dikenal sebagai hierarki birokrasi. Ini mencakup pembagian yang jelas dari tugas yang terintegrasi, yang dikendalikan melalui kualifikasi teknis untuk peran. Para ahli teknis diatur oleh aturan umum dan abstrak, yang untuk setiap situasi tertentu membutuhkan petunjuk khusus. Ini dicapai dengan menggunakan kategorisasi, di mana setiap kasus dikategorikan menurut kriteria tertentu dan diselesaikan dengan benar. Selain itu, hierarki jabatan penting karena jabatan yang lebih tinggi mengawasi jabatan yang lebih rendah. Prinsip hierarki telah "diorganisir secara monokratis" selama perkembangan birokrasi. Ini menunjukkan bahwa kategorisasi mengatur pekerjaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hierarki birokrasi cukup untuk melemahkan prinsip sekutu (WITTROCK et al., 1982).

Aspek penting birokrasi adalah aturan formal. Aturan ini membantu pengambilan keputusan, menetapkan dasar untuk koordinasi dan kontrol, dan meningkatkan legitimasi organisasi dalam lingkungan kelembagaan yang lebih luas. Berikut ini adalah beberapa aturan birokrasi yang formal (Hodson et al., 2012):

1. Aturan tertulis: Organisasi birokrasi memiliki aturan yang mengatur operasi mereka. Aturan ini biasanya ditulis dalam dokumen seperti manual, buku panduan, dan dokumen lain yang menjelaskan prosedur dan kebijakan organisasi.
2. Hierarki: Organisasi birokrasi memiliki hierarki kewenangan yang jelas, dengan setiap tingkat bertanggung jawab kepada tingkat di atasnya.
3. Impersonalitas: Dalam hubungan dengan klien dan pelanggan, organisasi birokratis bersifat impersonal. Ini berarti keputusan dibuat berdasarkan aturan dan prosedur daripada hubungan pribadi.
4. Komunikasi Formal: Organisasi birokrasi memiliki jalur komunikasi formal. Informasi mengalir dari tingkat yang

lebih rendah ke puncak hierarki, dan umpan balik mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke atas.

5. Organisasi birokrasi dicirikan oleh spesialisasi. Dalam organisasi, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu yang didasarkan pada kualifikasi dan keahlian mereka.
6. Standarisasi: Organisasi birokrasi berusaha untuk mencapai standarisasi dalam operasi mereka, yang berarti bahwa prosedur dan kebijakan diterapkan secara konsisten di seluruh perusahaan.

Birokrasi membutuhkan aturan formal ini untuk beroperasi, tetapi ada juga yang mengkritiknya, seperti bahwa itu dapat menjadi tidak fleksibel dan lambat menyesuaikan diri dengan perubahan.

Salah satu ciri khas birokrasi adalah ketergantungan pada prosedur. Organisasi birokrasi bergantung pada prosedur dan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat secara konsisten dan adil. Dengan bergantung pada metode ini, memiliki beberapa keuntungan, seperti (Jiang, 2023):

1. Konsistensi: Prosedur memastikan bahwa keputusan dibuat secara konsisten, tidak peduli siapa yang membuat keputusan. Ini mengurangi kemungkinan bias atau pilih kasih.
2. Efisiensi: Prosedur membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah, mengurangi jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat keputusan.
3. Akuntabilitas: Prosedur memberikan struktur pengambilan keputusan yang jelas, sehingga lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban individu dan organisasi atas tindakan mereka.
4. Transparansi: Prosedur membantu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak tertutup dan dapat dilihat secara langsung.

Namun, terlalu bergantung pada proses birokrasi memiliki beberapa kekurangan. Ini termasuk:

1. Ketidakfleksibelan: Prosedur mungkin tidak fleksibel dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah.
2. Birokrasi yang berbelit-belit: Birokrasi yang terlalu bergantung pada prosedur dapat menyebabkan keputusan tertunda atau terhambat.
3. Kurangnya kreativitas: Orang-orang mungkin takut menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, yang dapat menghambat kreativitas dan inovasi.

Secara keseluruhan, birokrasi bergantung pada prosedur; namun, penting untuk mengimbangnya dengan kebutuhan untuk kreatif dan fleksibel dalam proses pengambilan keputusan.

Kegagalan yang dihadapi birokrasi dalam mencapai efisiensi dan responsif dapat beragam, tergantung pada konteks dan tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa kendala yang dapat menghambat birokrasi dalam mencapai tujuannya (Kurland & Egan, 1999):

1. Korupsi: Korupsi dapat menjadi kendala utama untuk daya tanggap dan efisiensi birokrasi.
2. Perencanaan sedikit demi sedikit: Perencanaan sedikit demi sedikit dapat menghambat pembangunan pusat kota kecil karena tidak berfungsi sebagai alat yang berkelanjutan untuk perencanaan pembangunan.
3. Lingkungan yang unik: Karena kebutuhan untuk mencapai hasil yang tidak memihak secara birokratis, sektor publik menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menerapkan perubahan perusahaan daripada sektor swasta. Kebutuhan akan manajemen dan kepemimpinan sektor publik yang kuat telah meningkat sebagai akibat dari jumlah perubahan yang diperlukan dan kondisi yang mengharuskan perubahan tersebut.

4. Persepsi keadilan: Dibandingkan dengan pegawai swasta, pegawai negeri memiliki persepsi keadilan distributif dan prosedural yang lebih lemah dan kurang puas dengan atasan mereka. Ini dapat berdampak pada motivasi dan kinerja mereka, yang dapat menghambat efisiensi dan daya tanggap birokrasi.

Untuk mengatasi masalah ini, organisasi sektor publik dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti:

1. Tata kelola yang baik: Dimensi administratif, teknis, dan politik membentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Dimensi-dimensi ini dapat membantu menetapkan tujuan yang baik, menjalankan kepemimpinan yang baik, dan memastikan sektor publik yang efektif dan responsif yang dapat menangani tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan domestik dan eksternal.
2. Perencanaan Berkelanjutan: Perencanaan berkelanjutan dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan serta memastikan ketertiban, keselarasan, ekonomi, efisiensi, dan keindahan kota. Ini juga dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk perencanaan pembangunan daripada perencanaan sepotong-sepotong.
3. Kualitas kepemimpinan dan manajemen: Untuk menyegarkan, memberi energi baru, dan mengubah sektor ini dan masing-masing organisasinya, manajemen publik perlu merekrut dari luar, serta mengembangkan keterampilan tingkat lanjut di antara eksekutif senior yang ada. Hal ini dapat membantu memperoleh kemampuan yang dibutuhkan untuk kepemimpinan dan manajemen yang efektif.
4. Keadilan dan kepuasan: Dengan meningkatkan persepsi keadilan distributif dan prosedural serta memastikan bahwa pemimpin mereka kompeten dan mendukung, organisasi sektor publik dapat memastikan bahwa karyawannya bahagia dan adil. Ini dapat meningkatkan

motivasi dan kinerja pegawai negeri, yang dapat meningkatkan daya tanggap dan efisiensi birokrasi.

Karena sistem birokrasi mungkin tidak siap untuk menangani perubahan yang cepat dan tidak terduga, mereka dapat menghadapi tantangan ketika menghadapi perubahan sosial. Beberapa masalah khusus meliputi (Hanif Ramadhan et al., 2022a):

1. Budaya Birokrasi: Budaya birokrasi dapat menyebabkan partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan dan penelitian aksi menjadi kurang efektif.
2. Penyakit birokrasi: Karena "penyakit birokrasi", lembaga administratif atau birokrasi yang awalnya didirikan untuk menyelesaikan masalah publik akhirnya menjadi sumber masalah itu sendiri.
3. Nilai Terbaik: Nilai terbaik dapat dianggap sebagai beban manajemen tambahan; mereka dibungkus dalam bungkus birokrasi yang rumit dan hanya dihubungkan dengan kemungkinan intervensi pemerintah.
4. Jebakan kelembagaan yang menimbulkan konflik: Jebakan kelembagaan dapat membentuk tantangan adaptasi iklim dalam konteks ketahanan yang lambat, termasuk keterbatasan sumber daya, konflik nilai, dan warisan kolonial yang memengaruhi kelembaman.
5. Resistensi terhadap Perubahan: Sistem birokrasi saat ini yang dimaksudkan untuk melanggengkan narasi dominan mungkin sulit bagi pendidik dan dewan sekolah lokal untuk melakukan perubahan.

Mengembangkan model pemerintahan birokrasi dan penerapan perlakuan khusus yang ideal dan terukur mungkin akan membantu mengatasi masalah-masalah ini. Selain itu, perlu diperhatikan agar reformasi birokrasi tidak berubah menjadi hantu birokrasi yang menghambat peningkatan pelayanan. Terakhir, untuk mengatasi jebakan kelembagaan yang menyebabkan kelembaman, ada ide untuk membangun kapasitas lokal dan pembelajaran sosial tentang adaptasi iklim (Angeles et al., 2021).

C. BIROKRASI DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Kebijakan dan peraturan yang memengaruhi masyarakat sering kali dilaksanakan oleh birokrasi. Sebagai contoh, birokrasi pemerintah dapat memiliki wewenang untuk menerapkan undang-undang baru yang berkaitan dengan hak-hak sipil atau perlindungan lingkungan. Cara kebijakan diterapkan dapat memengaruhi perubahan sosial secara signifikan. Birokrasi juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini publik melalui strategi komunikasi mereka dan dengan memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan (Insani et al., 2021).

Selain itu, perubahan sosial dapat memengaruhi birokrasi dengan mengubah kebutuhan yang dihadapinya. Sebagai contoh, jika opini publik tentang suatu masalah tertentu, seperti perubahan iklim, berubah secara signifikan, birokrasi mungkin perlu mengubah kebijakan dan praktiknya untuk menyesuaikan dengan keadaan baru. Perubahan sosial juga dapat menghasilkan pembentukan birokrasi baru atau perluasan birokrasi yang sudah ada untuk mengatasi masalah baru (Winn, 1966).

Teknologi dan globalisasi telah mengubah birokrasi dan sistem pemerintahan. TIK telah membuat layanan publik dan tata kelola pemerintah lebih terbuka dan fleksibel. Struktur pemerintahan publik sangat dipengaruhi oleh adopsi teknologi pintar seperti analisis prediktif dan kecerdasan buatan. Namun, regulasi dan birokrasi yang ketat di beberapa negara dapat menghambat adopsi teknologi baru. Selain itu, globalisasi telah mengubah kebiasaan konsumerisme, harapan, kebutuhan, dan bahkan selera antara budaya, yang telah menyebabkan perubahan dalam peran negara dan birokrasi. Patrimonialisme yang kuat di dalam masyarakat Indonesia telah menguasai birokrasi, menciptakan pola relasi kekuasaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara atasan dan bawahan. Secara keseluruhan, teknologi dan globalisasi dapat berdampak baik atau buruk pada birokrasi,

dan dampaknya tergantung pada berbagai faktor seperti konteks politik dan budaya suatu negara (Razak et al., 2021).

Dalam perubahan sosial, dikenal juga istilah reformasi birokrasi. Salah satu definisi dari reformasi birokrasi adalah upaya untuk menciptakan aparatur negara yang lebih profesional, efektif, dan efisien dalam menjalankan fungsinya. Upaya untuk mengubah tujuan, struktur, dan prosedur sistem administrasi pemerintahan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan dikenal sebagai reformasi birokrasi. Penyetaraan posisi birokrasi, perombakan kelembagaan, dan agenda kebijakan yang komprehensif adalah beberapa bentuk reformasi birokrasi. Peran pejabat tinggi atau pemimpin birokrasi sangat menentukan keberhasilan reformasi birokrasi. Kewirausahaan birokrasi, yang terdiri dari manajer publik yang tidak terpilih dan staf profesional yang membuat strategi efektif untuk mendorong legislator dan kelompok konstituen lainnya untuk menerima agenda kebijakan mereka, adalah komponen penting dari reformasi birokrasi (Tomasouw et al., 2022).

Beberapa upaya reformasi birokrasi yang dapat mendukung perubahan sosial adalah sebagai berikut (Azmi et al., 2022):

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan negara: Sebuah penelitian menyarankan untuk meninggalkan model pemerintahan birokratis dan mengembangkan tata kelola pemerintahan baru untuk menyelesaikan tantangan yang muncul di era VUCA.
2. Membangun kapasitas dan akuntabilitas birokrasi: Studi tambahan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas birokrasi dan akuntabilitas, seperti penerapan standar kerja dan sistem penghargaan dan hukuman, dapat membantu reformasi birokrasi.
3. Mengerahkan para teknokrat: Birokrat teknis, atau teknokrat, dapat memainkan peran penting dalam mengerahkan tekanan internasional untuk mendapatkan

dukungan eksekutif dan mengatur perubahan kebijakan, seperti perluasan kebijakan gizi di Indonesia.

4. Mengevaluasi Pelaksanaan: Sebuah penelitian tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pinrang menyarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk menemukan kesalahan pelaksanaan dan menyelesaikan masalah.
5. Menyelaraskan reformasi dengan keadilan sosial: Pendekatan otonomi sekolah dan keadilan sosial yang digunakan selama reformasi dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan kekurangan yang dialami banyak siswa dan keluarga.

Ini hanyalah beberapa contoh reformasi birokrasi yang dapat mendukung perubahan sosial. Upaya lain yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

D. IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

Semua institusi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, harus melakukan reformasi birokrasi. Di Indonesia, sistem birokrasi masih tergolong dalam model politik birokrasi, di mana pengambilan kebijakan didasarkan pada kepentingan politik dan kedekatan dengan pemangku kepentingan. Akibatnya, reformasi birokrasi semakin sulit dilakukan karena sebagian besar kursi di lembaga pemerintahan dipegang oleh kelompok yang memiliki latar belakang politik yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Namun, untuk meningkatkan tata kelola negara, model ini harus ditinggalkan dan diganti dengan tata kelola pemerintahan (Hanif Ramadhan et al., 2022b).

Di antara tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya reformasi birokrasi, perbedaan pendapat tentang apa itu reformasi birokrasi, mengapa perlu dilakukan,

dan asumsi yang salah tentang cara melakukannya. Disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Inovasi dan modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi adalah cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti yang ditunjukkan oleh penerapan *e-government* di kota Denpasar. Namun, reformasi birokrasi di Indonesia memerlukan anggaran yang besar, banyak proses dan fungsi pemerintahan yang tumpang tindih, dan membutuhkan banyak karyawan. Salah satu tantangan tersendiri adalah kurangnya keinginan pegawai pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan karir mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, pengaturan jabatan harus diubah untuk menghasilkan pegawai pemerintah yang ahli dan profesional. Dibutuhkan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia melalui reformasi birokrasi karena efisiensi tata kelola pemerintahan sangat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan. Ini terutama berlaku untuk pengaturan sumber daya aparatur negara.

Banyak negara telah menerapkan reformasi birokrasi untuk memperbaiki sistem pemerintahan mereka, dan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain dalam konteks menghadapi perubahan sosial.

Singapura adalah salah satu contoh keberhasilan reformasi birokrasi. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, negara itu telah menerapkan berbagai reformasi birokrasi, yang telah membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonominya. Singapura memiliki sistem berbasis prestasi untuk rekrutmen dan promosi, yang telah menghasilkan pegawai negeri yang sangat mahir dan profesional. Selain itu, Singapura memiliki sistem evaluasi pegawai berbasis kinerja, yang telah menghasilkan pemerintahan yang sangat akuntabel dan jujur.

Di sisi lain, banyak tantangan yang menghadang pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Ini termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya reformasi birokrasi, perbedaan pendapat tentang apa itu reformasi birokrasi, mengapa perlu dilakukan, dan metodenya. Selain itu, ada asumsi-asumsi yang salah tentang reformasi birokrasi. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah menerapkan *e-government* di beberapa kota, seperti Denpasar, dan berusaha meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi.

Jadi, meskipun reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi banyak tantangan, upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan. Jika Indonesia dapat memperbaiki sistem pemerintahannya dan menghadapi perubahan sosial dengan lebih baik, mereka akan dapat belajar dari contoh yang berhasil.

BAB IV

BIROKRASI SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN

A. PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN

Peranan birokrasi dalam pembangunan sangat penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan berbagai program dan proyek pembangunan suatu negara. Birokrasi, sebagai mesin administratif pemerintah, memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan menjalankan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, peranan birokrasi mencakup sejumlah fungsi kunci yang memiliki dampak langsung terhadap kemajuan dan kesuksesan pembangunan nasional. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan beberapa peranan utama birokrasi dalam pembangunan yang melibatkan pengelolaan sumber daya, perencanaan, pemberantasan korupsi, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan publik. Setiap fungsi ini memiliki dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Birokrasi memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tanggung jawab mereka mencakup berbagai aspek kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, terutama program-program pembangunan yang

bertujuan untuk meningkatkan berbagai sektor penting dalam masyarakat.

Pertama-tama, birokrasi bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dan menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi tindakan konkret. Ini melibatkan merancang rencana operasional, menentukan langkah-langkah yang harus diambil, dan mengelola pelaksanaan program-program tersebut. Contohnya, dalam konteks pembangunan ekonomi, birokrasi dapat merancang kebijakan fiskal atau moneter, mengalokasikan anggaran, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini diterapkan dengan efektif.

Selanjutnya, birokrasi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut tersedia dan dikelola dengan baik. Ini mencakup manajemen alokasi anggaran, pengadaan tenaga kerja yang diperlukan, serta pengelolaan infrastruktur dan aset-aset publik lainnya. Dalam hal ini, birokrasi harus memastikan bahwa sumber daya tersedia pada waktu yang tepat dan digunakan secara efisien.

Selain itu, birokrasi juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi hasil dari program-program pembangunan. Mereka memainkan peran penting dalam mengukur kinerja dan dampak kebijakan serta program tersebut. Ini melibatkan pemantauan kemajuan, pengukuran hasil, dan penilaian efektivitas dari berbagai inisiatif pembangunan. Data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan ini sangat berharga dalam membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik dan lebih berdasar.

2. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran adalah dua aspek yang tak terpisahkan dalam pengelolaan program pembangunan, dan birokrasi memegang peran sentral dalam proses ini (Furqana & Handayani, 2022). Dalam perencanaan, birokrasi berperan dalam merumuskan rencana strategis yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan formulasi strategi untuk mencapainya. Mereka juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa program-program pembangunan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi mereka. Selanjutnya, birokrasi membantu menetapkan prioritas pembangunan, dengan memilih program-program yang memiliki dampak paling signifikan dan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat sumber daya yang terbatas.

Perencanaan dan penganggaran yang dipimpin oleh birokrasi adalah langkah awal yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan program pembangunan. Mereka memainkan peran penting dalam mengelola proses ini dengan cermat, sehingga program-program pembangunan menjadi lebih terarah, efisien, dan dapat memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat.

3. Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya adalah peran kunci yang dimainkan oleh birokrasi dalam konteks proyek-proyek pembangunan. Ini melibatkan manajemen berbagai jenis sumber daya publik, seperti keuangan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan aset-aset publik lainnya. Birokrasi harus merencanakan, mengawasi, dan mengelola sumber daya ini dengan cermat. Manajemen keuangan yang baik membantu mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana, sedangkan manajemen sumber daya manusia yang efisien memastikan adanya tim yang kompeten untuk melaksanakan proyek-proyek.

Selain itu, pengelolaan infrastruktur yang baik menjaga kelancaran proyek, dan pemeliharaan aset publik membantu menghindari kerugian. Dengan pengelolaan sumber daya yang efisien dan transparan, birokrasi membantu meminimalkan risiko korupsi dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan bijak untuk mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi adalah aspek penting dalam peran birokrasi dalam pembangunan. Birokrasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi dengan cermat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Ini mencakup berbagai tindakan, seperti pemantauan kemajuan, pengukuran hasil, dan identifikasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan.

Pemantauan kemajuan melibatkan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan proyek dan program pembangunan. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran hasil adalah proses penting untuk menilai sejauh mana tujuan dan target pembangunan telah tercapai. Dengan membandingkan hasil aktual dengan yang telah direncanakan, birokrasi dapat mengidentifikasi apakah program-program tersebut berhasil atau perlu disesuaikan.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Dengan mendeteksi masalah secara dini, birokrasi dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa program-program

berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh birokrasi adalah bagian integral dalam siklus pembangunan (Widanarto, 2013). Ini membantu memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil evaluasi membantu memperbaiki pelaksanaan program dan meningkatkan dampak positifnya pada masyarakat dan negara secara keseluruhan.

5. Pelayanan Publik

Selain mengelola program pembangunan, birokrasi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Hal ini mencakup berbagai jenis layanan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, dan banyak lagi. Layanan-layanan ini merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Bisri & Asmoro, 2019).

Kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuksesan pembangunan suatu negara. Layanan yang baik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, mempromosikan akses yang lebih mudah ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, layanan publik yang efisien juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan birokrasi (Yunas, 2016).

Birokrasi memiliki peran ganda sebagai penyelenggara program pembangunan dan penyedia layanan publik. Kualitas layanan yang baik tidak hanya menciptakan kesejahteraan sosial, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan peran tambahan yang dapat dimainkan oleh birokrasi dalam konteks pembangunan. Birokrasi memiliki potensi untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Caranya adalah dengan mengadakan dialog, berkomunikasi dengan masyarakat, mendengarkan masukan mereka, dan menerapkan perspektif serta kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai upaya, seperti mengorganisir pertemuan-pertemuan partisipatif, forum diskusi, atau konsultasi publik untuk memungkinkan warga untuk berbicara tentang kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang mereka hadapi. Birokrasi juga dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai program-program pembangunan yang sedang berlangsung, anggaran yang dialokasikan, dan hasil yang dicapai.

Melalui pemberdayaan masyarakat, birokrasi dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga negara, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam

mengidentifikasi solusi dan merencanakan tindakan yang efektif. Pemberdayaan masyarakat adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi inisiatif pemerintah atau birokrasi semata, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan riil masyarakat yang dilayani.

7. Pemberantasan Korupsi

Birokrasi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Birokrasi yang bersih dan beretika bertujuan untuk menjaga integritas dalam penggunaan sumber daya publik dan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan dengan benar, menghindari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Pemberantasan korupsi melibatkan pencegahan, deteksi, dan penindakan tindakan korupsi di semua tingkatan administrasi, serta penerapan aturan ketat, transparansi, dan sanksi bagi pelaku korupsi. Dengan menjaga integritas birokrasi, dana pembangunan dapat digunakan secara efisien untuk manfaat masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan (Sugiarto, 2010).

peran birokrasi dalam pembangunan dapat berbeda-beda antara negara-negara dan dapat dipengaruhi oleh sistem politik, budaya, dan hukum yang ada. Namun, dalam semua konteks, birokrasi memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara.

B. BIROKRASI DAN PERKEMBANGAN DALAM DEMOKRASI

Gambaran dari birokrasi di Indonesia adalah suatu hal yang rumit, urusan berbelit – belit dan pelayanan yang tidak memuaskan, setidaknya itulah yang terjadi saat ini. Friedrich dan Finer mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sejauh mana praktik administrasi negara modern sesuai dengan nilai-nilai

demokrasi. Mereka berpandangan bahwa masalahnya tidak terletak pada penggunaan kekuasaan oleh pejabat negara itu sendiri, melainkan 58pparat5858 bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya menganalisis bagaimana karakteristik masing-masing birokrasi dan demokrasi digunakan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada agar birokrasi berjalan secara efektif dan efisien (Hawari & Kartini, 2023)(Muhammad, 2018).

Martin Albrow, di sisi lain, mengidentifikasi tiga posisi dasar mengenai peran dan fungsi pejabat di dalam negara demokrasi yaitu Pertama, ada pandangan bahwa pejabat cenderung mengejar kekuasaan yang terlalu besar, dan kekuasaan tersebut perlu dikembalikan ke fungsinya yang seharusnya. Ini menggambarkan kebutuhan untuk membatasi atau mengawasi pejabat agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kedua, pandangan lain adalah bahwa pejabat memang memiliki kekuasaan yang signifikan dan tanggung jawab yang semakin bertambah. Oleh karena itu, pejabat harus menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan antara pemerintahan yang efisien dan pengawasan yang demokratis. Terakhir, ada pandangan bahwa kekuasaan perlu ada bagi pejabat, dan fokusnya adalah mencari metode pelayanan yang dapat dikelola bersama-sama. Ini menekankan pentingnya kerja sama antara pejabat dan masyarakat dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi (Aisyah, 2003).

Dalam sistem politik demokrasi liberal di Indonesia, dimulai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 3 November 1945, terjadi sebuah konfirmasi bahwa politik memiliki peran yang signifikan dalam menentukan sosok administrasi pemerintahan pada saat itu. Pada periode ini, infrastruktur politik memiliki kekuatan yang 58pparat58 lebih besar dibandingkan superstruktur politik, sehingga

menciptakan gambaran sistem politik yang disebut sebagai *bureau-nomia* (Muhammad, 2018).

Untuk memahami bagaimana birokratisasi memengaruhi pembangunan nasional di Indonesia, diperkenalkan dua konsep kunci. Pertama, konsep “masyarakat politik birokratik” yang pertama kali dikembangkan oleh Fred Riggs pada tahun 1966 dan kemudian digunakan oleh Karl D. Jackson pada tahun 1978 dalam konteks Indonesia. Kedua, konsep “kapitalisme birokratik” yang dirumuskan oleh Wittfogel pada tahun 1957 (Muhammad, 2018).

Berdasarkan konsep Jackson tentang masyarakat politik birokratik, beberapa ciri khas utama dapat diidentifikasi:

1. Dominasi Aparat Birokrasi

Lembaga politik yang memiliki dominasi utama adalah 59 aparat birokrasi. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Lemahnya Lembaga Politik Lainnya

Lembaga-lembaga politik lain seperti parlemen, partai politik, dan kelompok kepentingan cenderung lemah dan tidak mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap birokrasi. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya keseimbangan kekuasaan antara birokrasi dan lembaga-lembaga politik lainnya.

3. Masyarakat Pasif di Luar Birokrasi

Masyarakat di luar birokrasi, baik secara politis maupun ekonomis, cenderung pasif. Hal ini dapat mengakibatkan peran yang terbatas dari partai politik dan memperkuat posisi dominan birokrasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Dengan merujuk kepada ciri-ciri yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa birokrasi di Indonesia cenderung mendekati ketiga karakteristik yang disebutkan, yaitu masyarakat politik birokratik yang dominan oleh 60pparat birokrasi, lemahnya kontrol lembaga politik lainnya, serta masyarakat yang cenderung pasif di luar birokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan masyarakat politik birokratik ini dalam menjalankan pembangunan, terutama dalam menghadapi tantangan eksternal dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat meratakan hasil dari pembangunan kepada seluruh masyarakat.

Tiga kecenderungan yang dialami oleh setiap birokrasi, yaitu weberisasi (mendekati tipe ideal menurut Max Weber), parkinsonisasi (menuju keadaan patologis), dan orwelisasi (menguasai masyarakat), menggambarkan dinamika birokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, birokrasi di Indonesia cenderung menuju parkinsonisasi dan orwelisasi daripada weberisasi. Pendekatan yang dianut Max Weber untuk birokrasi mungkin terlalu ideal dan tidak selalu cocok dengan realitas atau situasi di negara tertentu.

Menurut analisis Dr. Muhadjir Darwin, birokrasi di Indonesia saat ini mengalami “penyakit” dengan tekanan yang lebih condong kepada hukum Parkinson. Hal ini mengindikasikan bahwa birokrasi cenderung berkembang menjadi lebih kompleks dan patologis, yang dapat menghambat efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Parameter birokrasi yang “sehat,” seperti konsep birokrasi Weber, kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan kondisi riil atau situasi di Indonesia, dan ini dapat menciptakan berbagai masalah dalam tata kelola pemerintahan.

C. PEMBINAAN KARIER BIROKRASI PEMERINTAHAN

Dapat dipastikan bahwa setiap pegawai, terlepas dari jabatan atau pekerjaannya, memiliki keinginan untuk mengalami kemajuan dalam perkembangan karier mereka. Hal ini dapat dimengerti karena manusia memiliki kebutuhan akan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri mereka sendiri, sehingga potensi yang ada dalam diri mereka dapat dikembangkan menjadi keterampilan dan kemampuan yang nyata.

Salah satu cara untuk mencapai kemajuan ini adalah melalui perencanaan dan pengembangan karier. Penting untuk diingat bahwa setiap manajer memiliki peran penting dalam manajemen sumber daya manusia. Ini berarti bahwa manajer memiliki tanggung jawab untuk membantu para bawahannya merencanakan dan mengembangkan karier mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua pegawai memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk merencanakan perkembangan karier mereka sendiri.

Meskipun para bawahan mungkin memiliki kemampuan untuk merencanakan karier mereka sendiri, manajer tetap memiliki kewajiban untuk mendukung pengembangan karier mereka. Proses perencanaan dan pengembangan karier hanya dapat berlangsung dengan baik jika beberapa elemen kunci ada, seperti:

1. Kepastian tentang semua posisi yang tersedia dalam organisasi.
2. Kriteria dan persyaratan yang jelas untuk mengisi posisi tertentu.
3. Kebijakan organisasi yang terdefinisi dengan baik tentang promosi.
4. Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara objektif.
5. Adanya informasi yang lengkap tentang masa kerja pegawai, termasuk perkiraan usia pensiun mereka.

Dampak positif dari pengembangan karier tidak hanya terlihat dari peningkatan penghasilan, tetapi juga dari segi psikologis. Ini termasuk pengakuan atas prestasi, kepercayaan yang diberikan dalam menangani tanggung jawab yang lebih besar, peluang yang lebih luas untuk mengaktualisasikan diri, dan penguatan pengalaman kerja seseorang. Kesempatan ini menciptakan kepuasan batin yang penting dalam dunia kerja.

D. ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN

Etika dalam konteks birokrasi mengacu pada norma-norma moral yang menjadi panduan bagi pegawai negeri sipil dalam mengatur perilaku dan tindakan mereka. Ini mirip dengan kode etik yang ada dalam profesi lain seperti kedokteran atau jurnalisisme. Etika birokrasi adalah kerangka nilai-nilai moral yang digunakan sebagai acuan oleh aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang bertujuan untuk kepentingan umum dan masyarakat. Birokrasi, yang dalam praktiknya mencakup pegawai negeri sipil, berperan penting dalam fungsi pemerintahan dan pembangunan. Mereka menjadi bagian dari lembaga, aparatus, sistem, dan prosedur yang beroperasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan umum dan masyarakat.

Etika birokrasi menegaskan bahwa para aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang mendukung kepentingan umum. Ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, transparansi, dan pelayanan masyarakat yang baik. Etika ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa birokrasi berfungsi dengan baik dalam mendukung proses pembangunan dan memberikan layanan publik yang efektif kepada masyarakat.

Etika birokrasi adalah landasan moral yang harus dipegang teguh oleh para aparat pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan integritas dan komitmen terhadap kepentingan umum dan masyarakat. Etika ini membantu memastikan bahwa birokrasi tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip moral yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial(Suaib, 2018).

Prinsip etika tetap menjadi landasan yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan birokrasi. Etika ini mencakup sikap dan perilaku yang ramah, sopan, dan tanpa pamrih, dengan fokus utama pada kepentingan masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan birokrasi, prinsip-prinsip dasar birokrasi yang berkualitas dan etika yang kuat tetap menjadi tujuan yang harus dijaga demi melayani kepentingan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

BAB V

REFORMASI BIROKRASI

A. DEFENISI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah, meningkatkan, dan memodernisasi struktur, prosedur, dan budaya kerja dalam birokrasi atau administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk menciptakan sebuah birokrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi semakin penting di berbagai negara di seluruh dunia karena peran kunci yang dimainkan oleh birokrasi dalam mengelola sumber daya publik dan memberikan pelayanan kepada warga negara.

Reformasi birokrasi mencakup berbagai aspek penting, termasuk restrukturisasi organisasi pemerintah, perbaikan prosedur dan regulasi, pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, reformasi birokrasi sering kali melibatkan perubahan dalam budaya kerja dan sikap pegawai pemerintah, dengan menekankan profesionalisme, etika, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat (Hirnings et al. 2015).

Salah satu tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini termasuk peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, pengurangan birokrasi yang berlebihan, dan peningkatan kemampuan untuk merespons cepat terhadap masalah-masalah yang

muncul. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan data menjadi elemen penting dalam memodernisasi birokrasi.

Selain meningkatkan kinerja pemerintah, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini termasuk perbaikan dalam aksesibilitas, kualitas, dan kecepatan layanan yang diberikan kepada warga negara. Dalam banyak kasus, reformasi ini juga berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Wüst 2017).

Tentu saja, reformasi birokrasi bukanlah tugas yang mudah. Implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk resistensi internal dari birokrasi yang sudah ada, masalah anggaran, dan tantangan politik. Namun, dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan yang berkelanjutan, reformasi birokrasi dapat berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

B. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas birokrasi atau administrasi pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan sistem birokrasi yang lebih baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik (Andersson, Stockhult, and Tengblad 2020). Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang tujuan reformasi birokrasi:

1. Meningkatkan Kinerja Birokrasi

Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi adalah meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah. Ini mencakup peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah ingin agar birokrasi mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik demi mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional.

2. Transparansi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran publik. Ini termasuk memberikan akses yang lebih besar kepada publik terkait dengan informasi pemerintah, kebijakan, dan anggaran sehingga masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah dengan lebih baik.

3. Akuntabilitas

Reformasi birokrasi juga mencakup upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa para pejabat pemerintah dan birokrat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan mekanisme pengawasan dan pelaporan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Salah satu fokus utama reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini termasuk peningkatan aksesibilitas, responsivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Reformasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik memenuhi standar yang tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Pemberantasan Korupsi

Reformasi birokrasi seringkali diarahkan pada upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah masalah serius dalam banyak birokrasi, dan reformasi bertujuan untuk mengurangi risiko korupsi dengan memperketat tata kelola keuangan publik dan meningkatkan transparansi.

6. Peningkatan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, reformasi birokrasi dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing negara dan pertumbuhan ekonomi. Dengan birokrasi yang lebih efisien, regulasi yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih baik, investasi dapat meningkat, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

C. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI

1. Sederhana dan Efisien

Strategi reformasi birokrasi yang sederhana dan efisien adalah pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan kekakuan dan kompleksitas dalam struktur dan proses birokrasi pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan sistem administrasi yang lebih mudah dipahami, lebih cepat dalam pengambilan keputusan, dan lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa birokrasi yang berlebihan, rumit, dan lambat dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam pemerintahan.

Salah satu langkah pertama dalam strategi ini adalah menyederhanakan prosedur administratif. Hal ini dapat mencakup pengurangan jumlah izin dan perijinan yang diperlukan dalam berbagai sektor, penghapusan aturan yang tidak perlu, dan penyederhanaan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penyederhanaan bisa diartikan sebagai upaya untuk memangkas birokrasi yang berlebihan dan mengurangi beban administratif yang harus ditangani oleh pemerintah (Andersson, Stockhult, and Tengblad 2020).

Selain itu, penggunaan teknologi informasi memainkan peran penting dalam strategi ini. Penerapan sistem informasi yang canggih dapat membantu mempercepat pengolahan data, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan layanan yang lebih cepat

dan efisien kepada masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat mengembangkan platform daring yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan permohonan perizinan secara online atau melacak status permohonan mereka tanpa harus mengunjungi kantor pemerintah.

Selain itu, strategi reformasi birokrasi yang sederhana dan efisien mencakup peningkatan komunikasi antarunit pemerintah. Dalam birokrasi yang terlalu tersegmentasi, sering kali terdapat hambatan komunikasi yang menghambat koordinasi antarunit. Upaya untuk mempromosikan kolaborasi dan berbagi informasi antarunit dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah yang muncul.

Meskipun strategi ini terdengar sederhana, implementasinya dapat menantang karena sering kali melibatkan perubahan dalam budaya kerja dan praktek yang telah ada dalam birokrasi. Oleh karena itu, komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan strategi reformasi birokrasi yang sederhana dan efisien.

2. Penggunaan Teknologi

Strategi reformasi birokrasi melalui penggunaan teknologi adalah pendekatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan dalam administrasi pemerintahan. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk transformasi birokrasi (Castro and Lopes 2022). Pendekatan ini mencakup beberapa langkah kunci:

- a. **E-Government:** Implementasi e-government merupakan salah satu aspek penting dalam strategi ini. E-government mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan publik secara elektronik. Melalui portal pemerintah online, masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, dan berinteraksi dengan pemerintah secara digital. Contohnya adalah sistem pengajuan pajak online, pendaftaran penduduk online, dan platform pelaporan pengaduan online. E-government dapat memangkas birokrasi fisik dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan.
- b. **Big Data dan Analitik:** Pemanfaatan big data dan analitik dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas. Data besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, mengukur kinerja, dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Misalnya, dalam sektor kesehatan, data medis dapat digunakan untuk memprediksi wabah penyakit, sementara dalam sektor keuangan, analitik dapat digunakan untuk mendeteksi potensi penipuan.
- c. **Blockchain:** Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam berbagai transaksi pemerintah. Misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, blockchain dapat digunakan untuk mencatat dan memantau setiap tahap proses, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, yang dapat mengurangi risiko korupsi.
- d. **Sistem Manajemen Arsip Digital:** Pindahan dari penyimpanan arsip fisik ke sistem manajemen arsip digital memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap dokumen-dokumen penting. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan menjadikan birokrasi lebih responsif terhadap permintaan masyarakat.

- e. **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Tidak hanya infrastruktur teknologi yang penting, tetapi juga keahlian SDM. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah dalam penggunaan teknologi adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dalam administrasi pemerintahan.

Strategi reformasi birokrasi melalui penggunaan teknologi bukan hanya tentang mengotomatiskan proses-proses, tetapi juga tentang transformasi budaya organisasi menuju pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif. Meskipun implementasinya dapat menantang, manfaat jangka panjangnya, termasuk penghematan biaya, peningkatan pelayanan, dan peningkatan transparansi, membuatnya menjadi langkah yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi (Ellalee and Al-Qaysi 2023).

3. **Pelatihan dan Pengembangan SDM**

Strategi reformasi birokrasi melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan pendekatan penting dalam upaya meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas birokrasi pemerintahan. Dalam konteks ini, SDM mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pejabat pemerintah, dan para pemimpin di semua tingkatan administrasi. Pendekatan ini menempatkan pemberdayaan SDM sebagai elemen sentral dalam menciptakan birokrasi yang kompeten, responsif, dan adaptif (Brinkerhoff and Morgan 2010).

- a. **Pengembangan Kompetensi:** Pelatihan dan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai pemerintah. Ini melibatkan pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, dan pengembangan kepemimpinan. Pegawai yang

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperbarui lebih mungkin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan yang lebih baik.

- b. Penyegaran Pengetahuan:** Birokrasi harus selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan perkembangan dalam berbagai sektor. Pelatihan dapat membantu pegawai untuk memahami dan merespons perubahan tersebut, seperti perubahan hukum, regulasi, atau teknologi. Hal ini meningkatkan kemampuan birokrasi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang relevan dan efektif.
- c. Pemberdayaan dan Tanggung Jawab:** Melalui pelatihan dan pengembangan, pegawai pemerintah dapat diberdayakan untuk mengambil inisiatif, berpikir kritis, dan berkontribusi pada perbaikan proses kerja dan pelayanan publik. Ini dapat menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif dan inovatif dalam birokrasi.
- d. Peningkatan Etika dan Integritas:** Pelatihan juga dapat fokus pada etika dan integritas dalam pemerintahan. Ini penting untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa pegawai pemerintah bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi.
- e. Pendekatan Berkelanjutan:** Reformasi birokrasi melalui pelatihan dan pengembangan SDM haruslah pendekatan berkelanjutan. Ini berarti bahwa pelatihan tidak hanya sekali-sekali, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang terintegrasi dalam budaya kerja birokrasi. Program pelatihan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Pentingnya strategi ini telah diakui secara luas dalam upaya reformasi birokrasi di berbagai negara. Meningkatkan kapasitas SDM bukan hanya tentang meningkatkan kualitas birokrasi, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan kompleks dan berubah dengan cepat dalam dunia yang terus berubah.

4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu strategi kunci dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan. Melalui pendekatan ini, birokrasi pemerintahan berusaha untuk lebih terfokus pada hasil yang dapat diukur dan mengembangkan sistem evaluasi yang obyektif untuk mengukur kinerja pegawai, unit kerja, dan lembaga pemerintah secara keseluruhan (Taj, Abdullah, and Khan 2017). Berikut adalah beberapa aspek kunci dari strategi reformasi birokrasi melalui pengukuran kinerja:

- a. **Pengembangan Indikator Kinerja:** Salah satu langkah awal dalam strategi ini adalah pengembangan indikator kinerja yang jelas dan relevan. Indikator ini harus terkait dengan tujuan-tujuan strategis pemerintah dan dapat diukur dengan objektif. Contoh indikator kinerja meliputi tingkat kepuasan masyarakat, waktu respon terhadap permintaan layanan, atau tingkat pencapaian target dalam program-program tertentu.
- b. **Sistem Penilaian Kinerja:** Reformasi birokrasi sering kali melibatkan pembentukan sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan transparan. Dalam sistem ini, pegawai dinilai berdasarkan pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sistem ini dapat memotivasi pegawai

untuk bekerja lebih keras dan menciptakan insentif untuk pencapaian yang lebih baik.

- c. **Penggunaan Teknologi:** Pengukuran kinerja dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data kinerja dengan cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pegawai, untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk memantau kinerja.
- d. **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Pengukuran kinerja bukan hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga tentang upaya perbaikan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu merespons temuan dari pengukuran kinerja dengan mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.
- e. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Strategi ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Melalui pengukuran kinerja yang terbuka, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil dan harapan.

Pentingnya pengukuran kinerja dalam reformasi birokrasi telah diakui secara luas sebagai alat yang efektif dalam memperbaiki pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Dalam mengimplementasikan strategi ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang dipilih benar-benar mencerminkan tujuan-tujuan strategis pemerintah dan bahwa sistem pengukuran kinerja beroperasi secara adil dan transparan.

5. Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah pendekatan kunci dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Strategi ini mengakui bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan serta layanan publik (Taj, Abdullah, and Khan 2017). Berikut adalah beberapa aspek kunci dari strategi reformasi birokrasi melalui partisipasi publik

Konsultasi dan Dialog. Pemerintah harus aktif mengundang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat mencakup penyelenggaraan pertemuan umum, konsultasi publik, dan dialog antara pemerintah dan warga negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi yang lebih luas (Weimer 2007).

Penggunaan Teknologi. Penggunaan teknologi informasi, seperti platform daring dan media sosial, dapat memfasilitasi partisipasi publik. Pemerintah dapat menggunakan platform ini untuk mengumpulkan masukan, menyebarkan informasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih efektif. Misalnya, penggunaan aplikasi ponsel untuk melaporkan masalah lingkungan atau penggunaan survei online untuk mengukur kepuasan terhadap pelayanan publik.

Pelibatan dalam Pengawasan dan Evaluasi. Masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja birokrasi. Mekanisme seperti kelompok advokasi, auditor sosial, atau forum pemantauan dapat membantu mengungkapkan kebijakan yang tidak efektif atau tindakan korupsi. Ini menciptakan mekanisme kontrol yang lebih kuat dan membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Pendidikan Publik. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi publik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu pemerintahan dan hak-hak mereka. Kampanye pendidikan publik dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pengambilan keputusan dan cara mereka dapat berkontribusi.

Pengintegrasian dalam Proses Perencanaan. Partisipasi publik juga harus diintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan visi dan tujuan pembangunan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah lebih memenuhi kebutuhan rakyat.

Strategi ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk lebih baik memahami beragam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja lebih baik demi kepentingan masyarakat.

D. HAMBATAN DALAM REFORMASI BIROKRASI

1. Resistensi Internal

Resistensi internal adalah salah satu hambatan utama dalam upaya reformasi birokrasi yang sering kali dihadapi oleh pemerintah dan organisasi yang ingin mengubah dan meningkatkan kinerja birokrasi. Resistensi ini muncul dari berbagai pihak di dalam birokrasi itu sendiri, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), manajemen senior, dan kelompok kepentingan internal. Resistensi internal bisa sangat kuat karena melibatkan perubahan dalam budaya organisasi, kebiasaan kerja, dan status quo yang telah ada selama bertahun-tahun (Weimer 2007). Beberapa faktor kunci yang menjelaskan

resistensi internal dalam hambatan reformasi birokrasi meliputi:

- a. **Ketidakpastian tentang Perubahan:** Salah satu penyebab resistensi adalah ketidakpastian yang muncul ketika perubahan diumumkan. Pegawai dan manajer mungkin merasa tidak yakin tentang bagaimana perubahan akan memengaruhi pekerjaan mereka, status mereka, atau prospek karier mereka. Hal ini dapat menciptakan kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap reformasi.
- b. **Ketidakpuasan Personal:** Beberapa individu mungkin merasa puas dengan situasi saat ini, terutama jika mereka telah menguasai sistem yang ada. Mereka mungkin merasa bahwa perubahan akan mengancam posisi mereka atau mengharuskan mereka untuk belajar keterampilan baru. Ketidakpuasan personal ini bisa menjadi dorongan kuat untuk melawan reformasi.
- c. **Ketidaksetujuan terhadap Perubahan:** Beberapa PNS dan manajer mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang arah reformasi atau keyakinan bahwa perubahan tersebut tidak diperlukan. Mereka dapat menganggap perubahan sebagai intervensi yang tidak relevan atau merugikan bagi tujuan organisasi.
- d. **Kepentingan Kelompok Internal:** Dalam beberapa kasus, kelompok internal atau faksi di dalam organisasi dapat memiliki kepentingan yang berlawanan dengan reformasi. Misalnya, kelompok yang telah mendapatkan keuntungan dari praktik yang akan diubah dapat melobi untuk mempertahankannya.
- e. **Budaya Organisasi yang Kaku:** Jika budaya organisasi telah lama didasarkan pada hierarki yang kuat, birokrasi yang tebal, atau norma-norma yang tidak mendukung inovasi, maka perubahan yang

signifikan akan menghadapi hambatan yang kuat dalam merubah budaya tersebut.

- f. **Ketidakmampuan Menyusun Argumentasi yang Kuat:** Pemerintah atau pemimpin organisasi harus mampu menyusun argumen yang kuat dan membangun legitimasi untuk perubahan. Jika argumen ini tidak disusun dengan baik atau tidak cukup meyakinkan, maka resistensi internal dapat semakin kuat.

Cara untuk mengatasi resistensi internal, penting bagi pemerintah atau organisasi yang melakukan reformasi birokrasi untuk memahami sumber-sumber resistensi ini dan mengadopsi strategi yang tepat. Ini mungkin melibatkan pendekatan berbasis partisipatif, komunikasi yang efektif, pelibatan aktif dengan pegawai, dan pemantauan yang cermat selama proses reformasi. Selain itu, perlu diingat bahwa resistensi internal dapat diatasi dengan dukungan dari manajemen senior yang kuat dan komitmen politik yang tinggi terhadap reformasi.

2. Masalah Anggaran

Masalah anggaran seringkali menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi memerlukan investasi dalam perubahan prosedur, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi baru. Namun, anggaran yang terbatas atau tidak memadai dapat menghambat kemampuan pemerintah atau organisasi untuk menerapkan reformasi secara efektif (Cangiano, Curristine, and Lazare 2014). Beberapa aspek penting terkait masalah anggaran dalam hambatan reformasi birokrasi meliputi:

- a. **Keterbatasan Dana:** Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dana yang dialokasikan untuk reformasi birokrasi. Proyek-proyek reformasi yang ambisius seringkali membutuhkan investasi besar, termasuk pelatihan pegawai, pembelian perangkat lunak atau peralatan baru, serta perubahan infrastruktur fisik. Jika anggaran tidak mencukupi, implementasi reformasi dapat terhambat.
- b. **Prioritas Anggaran yang Bersaing:** Pemerintah seringkali dihadapkan pada persaingan anggaran antara berbagai sektor dan program. Reformasi birokrasi harus bersaing dengan program-program lain untuk mendapatkan alokasi dana yang memadai. Ini dapat menjadi masalah jika reformasi tidak dianggap sebagai prioritas tertinggi oleh pemerintah.
- c. **Resistensi terhadap Penghematan Anggaran:** Reformasi birokrasi seringkali melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan anggaran. Namun, hal ini dapat memicu resistensi dari kelompok atau individu yang terkait dengan program atau proyek yang akan dikurangi atau dihentikan.
- d. **Perubahan dalam Kebijakan Fiskal:** Keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal, seperti pemotongan anggaran atau peningkatan pajak, dapat berdampak signifikan pada kemampuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Perubahan kebijakan semacam itu dapat mengurangi anggaran yang tersedia atau membatasi fleksibilitas dalam penggunaannya.
- e. **Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien:** Masalah dalam pengelolaan anggaran, seperti korupsi atau administrasi yang buruk, dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Ini dapat menjadi hambatan dalam upaya reformasi birokrasi.

yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Pentingnya penanganan masalah anggaran dengan bijak dalam konteks reformasi birokrasi tidak dapat diabaikan. Hal ini memerlukan perencanaan anggaran yang hati-hati, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, dan kemampuan untuk membangun argumentasi yang kuat tentang manfaat ekonomi dan sosial dari reformasi. Dalam beberapa kasus, dana tambahan atau sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman internasional atau investasi swasta, dapat digunakan untuk mendukung reformasi birokrasi yang penting.

KESIMPULAN

Birokrasi dalam pemerintahan adalah sebuah sistem administratif yang penting dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Birokrasi memiliki peran utama dalam mengelola kebijakan pemerintah, menyediakan layanan publik, menjaga stabilitas, dan memastikan efisiensi dalam berbagai sektor pemerintahan. Meskipun kompleks, birokrasi berperan sentral dalam mewujudkan tujuan pemerintahan untuk melayani kepentingan warga negara, meskipun sering dihadapkan pada tantangan dan perubahan dalam konteks politik dan sosial yang selalu berubah. Beberapa aspek yang relevan dalam studi tentang birokrasi dalam pemerintahan mencakup hierarki, rasionalitas, spesialisasi, kepatuhan terhadap aturan, diskresi birokratik, hubungan dengan politik, akuntabilitas, peran dalam pengambilan keputusan, reformasi birokrasi, dan isu etika.

Birokrasi memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks Indonesia, seperti halnya dalam banyak negara lainnya. Struktur birokrasi yang efisien dan transparan adalah kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Di Indonesia, birokrasi telah memainkan peran sentral dalam mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan program-program pembangunan nasional. Proses keputusan birokrasi dalam pemerintahan adalah serangkaian tahapan yang cermat dan terstruktur, termasuk penentuan agenda, penelitian dan analisis, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan implementasi. Proses ini berfokus pada mencari solusi yang paling sesuai dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan birokrasi melibatkan alokasi sumber daya, koordinasi, komunikasi, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program dan kebijakan berjalan sesuai rencana dan

memberikan manfaat yang diharapkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak tantangan yang muncul dalam konteks birokrasi, seperti birokrasi yang kompleks, praktik korupsi, dan lambatnya pelayanan publik

Interaksi antara kelompok strategis dan birokrasi melibatkan pengembangan kebijakan, komunikasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Kendala dan tantangan dalam hubungan antara kelompok strategis dan birokrasi meliputi perbedaan prioritas, kekurangan sumber daya, kurangnya koordinasi, birokrasi yang kompleks, biaya politik, ketidakpastian lingkungan, kurangnya transparansi, resistensi internal, dan lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan manajemen yang efektif dan kerja sama yang baik antara kedua entitas ini dalam pemerintahan.

Pentingnya reformasi birokrasi di Indonesia tidak dapat disangkal, terutama dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi yang berhasil harus terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Semakin efisien dan responsif birokrasi, semakin baik pelayanan publik dapat diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di Indonesia merupakan perjalanan yang harus diteruskan dengan tekad kuat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, Thomas, Helen Stockhult, and Stefan Tengblad. 2020. "Human Resource Development International Strategies for Co-Workership Retention Strategies for Co-Workership Retention." *Human Resource Development Internationa*.
- Arifin, Muhammad Zainul, and Irsan. 2019. "KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." *Lex Librium* 5(2): 887–96.
- Bardach, Eugene. 2017. *A Practical Guide for Policy Analysis : The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. 4th ed. Los Angeles: CQ Press.
- Brinkerhoff, Derick W., and Peter J. Morgan. 2010. "Capacity and Capacity Development: Coping with Complexity." *Public Administration and Development* 30(1): 2–10.
- Budiman, Yerry, Sarah Sambiran, and Johannis Kaawoan. 2017. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe." *Jurnal Eksekutif* 1(1).
- Cangiano, M., Teresa Curristine, and M. Lazare. 2014. *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*.
- Castro, Conceicao, and Cristina Lopes. 2022. "Digital Government and Sustainable Development." *Journal of the Knowledge Economy* 13(3).
- Cecep Kurniawan, Setyawan Widyarto, Lukman Yudho Prakoso. 2018. "Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman Di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara." *Strategi Pertahanan Laut*

4(1): 1-18.

Ellalee, Haider, and Israa I Al-Qaysi. 2023. "Digital Government a Pathway to Sustainable Development." *SSRN Electronic Journal*.

Endah, Kiki, and Endah Vestikowati. 2021. "Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7(3): 647-56.

Hartati, Sri. 2020. "Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 8(2): 65-84.

Henry, Nicholas. 2019. *6 Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar Public Administration and Public Affairs*. Routledge.

Hirnings, C. R., Royston Greenwood, Trish Reay, and Roy Suddaby. 2015. "Dynamics of Change in Organizational Fields." In *Hanbook of Organizational Change and Innovation*, https://www.researchgate.net/profile/C-Hirnings/publication/260639099_The_dynamics_of_change_in_organizational_fields/links/5cf19160a6fdcc8475fb803f/The-dynamics-of-change-in-organizational-fields.pdf.

Lestari, Ratna Ani. 2019. "Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik." *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9(1).

Meier, Kenneth, and Laurence O'Toole. 2006. "Public Management and Organizational Performance: The Impact of Managerial Quality." *Journal of Policy Analysis and Management* 21: 629-43.

Moynihan, Donald P., and Sanjay K. Pandey. 2010. "The Big Question for Performance Management: Why Do Managers Use Performance Information?" *Journal of Public Administration Research and Theory* 20(4): 849-66.

Nahrudin, Zulfan. 2014. "Akuntabilitas Dan Transparansi

- Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(2): 193–201.
- Rika Ramadhanti. 2018. "Politik Dan Birokrasi Pemerintahan." *Jurnal Triaspolitika* 2(1): 96–104.
- Sabatier, Paul A. 2007. *Theories of Policy Process Theories of the Policy Process*. Westview Press.
- Stillman, Richard Joseph, and Richard Stillman. 2020. *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning.
- Straussman, Jeffrey D. 2014. "Bureaucratic Politics and Administrative Reform: Why Politics Matters." *Public Administration Review*: 698–708.
- Taj, Aamer, F. Abdullah, and Shahwali Khan. 2017. "Political Clientelism-Beyond the Public Choice Explanation." *Journal of Humanities and Social Sciences* 25(1). [http://journals.uop.edu.pk/papers/9\(1\).pdf](http://journals.uop.edu.pk/papers/9(1).pdf).
- Weimer, David L. 2007. "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector." *Journal of Policy Analysis and Management* 13(1): 187–92.
- Wüst, Luc. 2017. "TRANSLATING INSTITUTIONAL CHANGE Towards a Processual Framework for Rule-Based Translation." In *Research Workshop on Institutions and Organisations RWIO*, https://www.researchgate.net/publication/319184241_TRANSLATING_INSTITUTIONAL_CHANGE_Towards_a_processual_Framework_for_rule-based_Translation.

TENTANG PENULIS



Dr. Ani Heryani, S.Sos., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya

Lahir di Tasikmalaya, 21 September 1970. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Administrasi Negara STIA Tasikmalaya Tahun 1994, Magister Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2003, dan Tahun 2009 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya sejak tahun 1994, pernah menjadi Dosen Tidak Tetap di STISIP Tasikmalaya, di STISIP Bina Putera Banjar, Universitas Subang dan Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon. Tahun 2014-2022 memperoleh tugas tambahan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya.

Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain Dewan Pakar KPPI, Presidium KAHMI Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Penasihat TULIP (Teras Untuk Literasi Perempuan). Aktif pula sebagai narasumber di berbagai Seminar, bimbingan teknis maupun diklat.

Penghargaan yang pernah di raih antara lain Gender Champion Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kualitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQaR (*Certified International Qualitative Research*) dan CPHCM (*Certified Profesional Human Capital Management*). Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang sosial politik, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis buku, book chapter dan artikel di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks dan telah menerbitkan tulisannya di Jurnal Internasional bereputasi.

Google Scholar :

<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=IzIHFTEAAAAJ>



Dr. Ade Iskandar, SIP, M.Si
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya

Lahir di Tasikmalaya, 13 Maret 1969. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Pemerintahan STISIP Tasikmalaya, Magister Ilmu Administrasi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya dan pada Tahun 2014 berhasil menyelesaikan Program Doktor Bidang Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya (STISIP Tasikmalaya) sampai dengan tahun 2017, pernah memperoleh tugas tambahan selaku Ketua STISIP Tasikmalaya periode 2016-selesai. Saat ini menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya.

Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kuantitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQnR (*Certified International Quantitative Research*). Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang pemerintahan, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis buku dan artikel di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks bahkan salah satu tulisannya telah diterbitkan di Jurnal Internasional bereputasi.

Google Scholar :

<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=zLYU2CEAAAAJ>



Dr. Malik, M.Si
Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik
Universitas Bandar Lampung

Lahir di Kendari pada tanggal 16 Oktober 1966, Manamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kendari, Kemudian menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah khusus olahragawan Ragunan Jakarta Selatan. Menamatkan pendidikan S-1 di Universitas Halu Oleo Kendari tahun 1990, Jurusan Administrasi Negara.

Pada tahun 2003 menyelesaikan pendidikan S-2 di Unpad Bandung Bidang Ilmu Sosial, BKU Ilmu Administrasi dan S3 Bidang Administrasi Publik juga diselesaikan di Unpad Bandung tahun 2009. Menulis buku Administrasi Pembangunan, Metode Penelitian Sosial, Kepemimpinan dan motivasi, Kebijakan Pemerintah Lokal Kontemporer, Metode Penulisan Ilmiah, Penerapan Kompetensi Pedagogik Untuk Pengukuran Kinerja Guru, Filsafat Administrasi, Administrasi dan Manajemen, Otonomi Daerah, Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia, Reformasi Administrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Etika Pemerintahan dan melakukan penelitian tentang Organisasi Publik, Kebijakan Pemerintah, E-Government maupun Kebijakan Publik, yang diterbitkan pada jurnal-jurnal Lokal, Nasional maupun Internasional. Penulis pernah menjabat Dekan FIA pada Universitas Lakidende, Menjadi Ketua Lembaga Penelitian Unilaki, mengajar dan membimbing baik S1, S2 maupun S3 di Univ. Lakidende, Pascasarjana Adm. Pembangunan Univ. Halu Oleo, Pascasarjana Adm. Publik Untirta, Univ. Terbuka, dan Pascasarjana Undip, Pascasarjana MIA UBL.

Saat ini sebagai Dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) FISIP S-1 dan S-2 Magister Ilmu Administrasi (MIA) dan Kini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi pada MIA, serta menjadi Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik pada Universitas Bandar Lampung.
E-mail: malik@ubl.ac.id.

